

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(CALK)
TAHUN ANGGARAN 2024**



**DINAS KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Laporan Keuangan akhir Tahun Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran (Per 31 Desember 2024) telah selesai disusun. Laporan Keuangan akhir Tahun ini disusun dalam rangka memenuhi peraturan perundangan bidang pengelolaan keuangan Negara/daerah khususnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan peraturan perundangan tersebut, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pada Akhir Tahun Anggaran 2024 Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran menyusun Laporan Keuangan akhir Tahun yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan dengan dilampiri oleh Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja. Adapun uraian secara lengkap dan terinci disajikan lebih lanjut dalam laporan ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dengan tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun ini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna sebagai media pertanggungjawaban serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja keuangan Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran.

Parigi, 02 Januari 2025

KEPALA DINAS KBP3A
KABUPATEN PANGANDARAN



H. DANI HAMDANI, S.Sos., MM

NIP. 19650417 199003 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
PD : 2.08.2.14.0.00.01. - DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN AN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN DESEMBER 2024

1 - 3

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	9.954.432.821,00	8.417.570.661,00	84,56	9.453.635.898,00
5.1.	BELANJA OPERASI	9.954.432.821,00	8.417.570.661,00	84,56	9.402.625.898,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	2.783.309.000,00	2.526.340.069,00	90,77	2.162.476.888,00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.417.308.086,00	1.384.296.579,00	97,67	1.379.924.598,00
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.055.601.399,00	1.023.868.427,00	96,99	1.013.058.431,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.055.601.399,00	1.023.868.427,00	96,99	1.013.058.431,00
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	98.540.401,00	98.204.222,00	99,66	94.054.078,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	98.540.401,00	98.204.222,00	99,66	94.054.078,00
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	140.390.250,00	139.890.000,00	99,64	150.330.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	140.390.250,00	139.890.000,00	99,64	150.330.000,00
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	15.595.500,00	15.540.000,00	99,64	15.540.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	15.595.500,00	15.540.000,00	99,64	15.540.000,00
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	51.530.451,00	51.345.780,00	99,64	51.490.620,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	51.530.451,00	51.345.780,00	99,64	51.490.620,00
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.756.019,00	3.757.829,00	100,05	3.465.849,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.756.019,00	3.757.829,00	100,05	3.465.849,00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	12.685,00	12.431,00	98,00	14.337,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	12.685,00	12.431,00	98,00	14.337,00
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	43.557.458,00	43.386.447,00	99,61	43.697.651,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	43.557.458,00	43.386.447,00	99,61	43.697.651,00
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.080.963,00	2.072.843,00	99,61	2.068.421,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.080.963,00	2.072.843,00	99,61	2.068.421,00
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	6.242.960,00	6.218.600,00	99,61	6.205.211,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	6.242.960,00	6.218.600,00	99,61	6.205.211,00
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.130.940.914,00	959.833.490,00	84,87	672.652.290,00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	774.356.000,00	669.578.000,00	86,47	537.574.400,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	774.356.000,00	669.578.000,00	86,47	537.574.400,00
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	-	-	-	1.009.600,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	-	-	-	1.009.600,00
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	356.584.914,00	290.255.490,00	81,40	134.068.290,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	356.584.914,00	290.255.490,00	81,40	134.068.290,00
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	235.060.000,00	182.210.000,00	77,52	109.900.000,00
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	225.460.000,00	175.010.000,00	77,62	103.600.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	225.460.000,00	175.010.000,00	77,62	103.600.000,00
5.1.01.03.08.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	9.600.000,00	7.200.000,00	75,00	6.300.000,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	9.600.000,00	7.200.000,00	75,00	6.300.000,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.171.123.821,00	5.891.230.592,00	82,15	7.239.649.010,00
5.1.02.01.	Belanja Barang	1.830.885.480,00	1.642.362.955,00	89,70	2.119.039.779,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.830.885.480,00	1.642.362.955,00	89,70	2.119.039.779,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	-	-	-	4.910.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	34.547.000,00	32.500.000,00	94,07	17.751.440,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	-	-	-	3.897.173,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	10.528.245,00	10.139.200,00	96,30	6.799.077,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	50.246.720,00	50.233.230,00	99,97	76.918.682,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	203.962.720,00	158.133.560,00	77,53	278.733.300,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.700.000,00	1.260.000,00	26,81	2.300.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	-	-	-	2.700.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.556.245,00	-	-	2.019.600,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	-	-	-	38.250.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	62.388.550,00	44.490.965,00	71,31	21.093.527,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	-	-	-	114.800,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	291.276.000,00	291.276.000,00	100,00	374.565.760,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.160.430.000,00	1.048.080.000,00	90,32	1.179.504.500,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	6.250.000,00	6.250.000,00	100,00	12.500.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	-	-	-	79.481.920,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	-	-	-	17.500.000,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	2.394.092.041,00	1.604.642.109,00	67,03	1.921.009.848,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	2.112.760.041,00	1.339.092.109,00	63,38	1.713.525.848,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	171.200.000,00	131.800.000,00	76,99	164.750.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	-	-	-	138.700.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	608.544.000,00	559.335.000,00	91,91	559.500.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	7.500.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	811.750.000,00	326.350.000,00	40,20	385.950.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	97.400.000,00	63.800.000,00	65,50	129.000.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	97.400.000,00	63.800.000,00	65,50	129.000.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	54.000.000,00	24.000.000,00	44,44	24.000.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	109.650.000,00	48.750.000,00	44,46	48.750.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	13.500.000,00	13.500.000,00	100,00	16.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	10.000.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.200.000,00	514.000,00	42,83	504.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	29.139.325,00	20.224.830,00	69,41	24.273.788,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	13.876.716,00	11.696.000,00	84,29	6.684.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	78.000.000,00	56.365.479,00	72,26	58.804.060,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	600.000,00	-	-	109.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	16.500.000,00	8.956.800,00	54,28	10.001.000,00
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	145.282.000,00	129.500.000,00	89,14	136.000.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	124.000.000,00	124.000.000,00	100,00	126.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	9.500.000,00	4.500.000,00	47,37	7.000.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	11.782.000,00	1.000.000,00	8,49	3.000.000,00
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	-	-	-	71.484.000,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	-	-	-	71.484.000,00
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	136.050.000,00	136.050.000,00	100,00	-
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	136.050.000,00	136.050.000,00	100,00	-
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	51.202.500,00	41.708.500,00	81,46	423.379.225,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	31.500.000,00	22.006.000,00	69,86	23.000.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	16.500.000,00	13.756.000,00	83,37	11.000.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.000.000,00	750.000,00	25,00	1.500.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	12.000.000,00	7.500.000,00	62,50	10.500.000,00
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	19.702.500,00	19.702.500,00	100,00	399.379.225,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	19.702.500,00	19.702.500,00	100,00	399.379.225,00
5.1.02.03.05.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	1.000.000,00
5.1.02.03.05.0028	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	-	-	-	1.000.000,00
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	2.889.693.800,00	2.597.267.028,00	89,88	2.770.970.158,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.889.693.800,00	2.597.267.028,00	89,88	2.770.970.158,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	136.619.800,00	53.109.028,00	38,87	97.578.158,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	28.834.000,00	22.798.000,00	79,07	23.807.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.724.240.000,00	2.521.360.000,00	92,55	2.649.585.000,00
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.250.000,00	5.250.000,00	100,00	5.250.000,00
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.250.000,00	5.250.000,00	100,00	5.250.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	5.250.000,00	5.250.000,00	100,00	5.250.000,00
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	500.000,00
5.1.06.01.	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	-	-	-	500.000,00
5.1.06.01.01.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	-	-	-	500.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	-	-	-	500.000,00
5.2.	BELANJA MODAL	-	-	-	51.010.000,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-	51.010.000,00
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	-	-	-	51.010.000,00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	-	-	-	51.010.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	-	-	-	42.310.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-	-	-	8.700.000,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(9.954.432.821,00)	(8.417.570.661,00)	84,56	(9.453.635.898,00)

Parigi, 31 Desember 2024

Pengguna Anggaran



H. DANI HAMDANI, S.Sos., MM
196504171990031013

PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
2.08.2.14.0.00.01. - DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
N E R A C A

Halaman 1 dari 4

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	
		2024	2023
1	2	3	4
1.	ASET	2.779.680.052,58	3.529.162.792,12
1.1.	ASET LANCAR	113.479.548,33	175.884.916,87
1.1.12.	Persediaan	113.479.548,33	175.884.916,87
1.1.12.01.	Barang Pakai Habis	113.479.548,33	175.884.916,87
1.1.12.01.03.0001.	Alat Tulis Kantor	18.073.624,33	10.562.995,33
1.1.12.01.03.0003.	Bahan Cetak	1.711.510,00	1.711.510,00
1.1.12.01.03.0004.	Benda Pos	0	400.000,00
1.1.12.01.03.0007.	Perabot Kantor	0	58.006,00
1.1.12.01.03.0008.	Alat Listrik	731.868,00	1.184.568,00
1.1.12.01.03.0013.	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.402.501,00	4.145.239,00
1.1.12.01.05.0002.	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	89.560.045,00	157.822.598,54
1.3.	ASET TETAP	2.567.139.602,37	3.254.216.973,37
1.3.02.	Peralatan dan Mesin	5.821.203.911,37	5.873.211.911,37
1.3.02.02.	Alat Angkutan	3.966.073.848,00	3.966.073.848,00
1.3.02.02.01.0002.	Kendaraan Bermotor Penumpang	783.870.486,00	783.870.486,00
1.3.02.02.01.0003.	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	989.844.500,00	989.844.500,00
1.3.02.02.01.0004.	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	949.095.862,00	949.095.862,00
1.3.02.02.01.0006.	Kendaraan Bermotor Khusus	1.243.263.000,00	1.243.263.000,00
1.3.02.04.	Alat Pertanian	0	52.008.000,00
1.3.02.04.01.0004.	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	0	52.008.000,00
1.3.02.05.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	517.183.464,00	517.183.464,00
1.3.02.05.01.0004.	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	67.177.712,00	67.177.712,00
1.3.02.05.01.0005.	Alat Kantor Lainnya	235.138.700,00	235.138.700,00
1.3.02.05.02.0001.	Mebel	64.953.300,00	64.953.300,00
1.3.02.05.02.0004.	Alat Pendingin	7.000.000,00	7.000.000,00
1.3.02.05.02.0006.	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	113.089.227,00	113.089.227,00
1.3.02.05.03.0001.	Meja Kerja Pejabat	22.214.496,00	22.214.496,00
1.3.02.05.03.0003.	Kursi Kerja Pejabat	7.610.029,00	7.610.029,00
1.3.02.06.	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	241.380.400,00	241.380.400,00
1.3.02.06.01.0002.	Peralatan Studio Video dan Film	5.680.400,00	5.680.400,00
1.3.02.06.02.0001.	Alat Komunikasi Telephone	235.700.000,00	235.700.000,00
1.3.02.07.	Alat Kedokteran dan Kesehatan	17.380.000,00	17.380.000,00
1.3.02.07.01.0029.	Alat Kedokteran Lainnya	17.380.000,00	17.380.000,00
1.3.02.08.	Alat Laboratorium	20.103.000,00	20.103.000,00
1.3.02.08.01.0056.	Alat Laboratorium Lain	20.103.000,00	20.103.000,00
1.3.02.10.	Komputer	1.057.083.199,37	1.057.083.199,37
1.3.02.10.01.0002.	Personal Computer	829.492.073,04	829.492.073,04
1.3.02.10.02.0001.	Peralatan Mainframe	3.165.425,26	3.165.425,26
1.3.02.10.02.0003.	Peralatan Personal Computer	200.513.201,07	200.513.201,07
1.3.02.10.02.0004.	Peralatan Jaringan	23.912.500,00	23.912.500,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	
		2024	2023
1	2	3	4
1.3.02.18.	Rambu-rambu	2.000.000,00	2.000.000,00
1.3.02.18.01.0002.	Rambu Tidak Bersuar	2.000.000,00	2.000.000,00
1.3.03.	Gedung dan Bangunan	1.841.892.285,00	1.841.892.285,00
1.3.03.01.	Bangunan Gedung	1.841.892.285,00	1.841.892.285,00
1.3.03.01.01.0001.	Bangunan Gedung Kantor	1.841.892.285,00	1.841.892.285,00
1.3.05.	Aset Tetap Lainnya	1.830.000,00	1.830.000,00
1.3.05.01.	Bahan Perpustakaan	1.830.000,00	1.830.000,00
1.3.05.01.01.0001.	Buku Umum	1.830.000,00	1.830.000,00
1.3.07.	Akumulasi Penyusutan	(5.097.786.594,00)	(4.462.717.223,00)
1.3.07.01.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(4.617.203.193,00)	(4.025.806.679,00)
1.3.07.01.02.0009.	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	(2.964.675.818,00)	(2.598.325.307,00)
1.3.07.01.04.0010.	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya	0	(46.590.500,00)
1.3.07.01.05.0005.	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(257.741.402,00)	(227.248.678,00)
1.3.07.01.05.0011.	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(145.470.360,00)	(132.938.004,00)
1.3.07.01.05.0021.	Akumulasi Penyusutan Meja dan kursi kerja/rapat pejabat	(30.816.451,00)	(29.044.576,00)
1.3.07.01.06.0006.	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Alat Studio Lainnya	(5.680.400,00)	(5.680.400,00)
1.3.07.01.06.0017.	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	(216.225.000,00)	(169.485.000,00)
1.3.07.01.07.0029.	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	(17.380.000,00)	(14.845.417,00)
1.3.07.01.08.0064.	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Unit Alat Laboratorium Lainnya	(20.103.000,00)	(20.103.000,00)
1.3.07.01.10.0003.	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	(748.524.844,00)	(612.891.364,00)
1.3.07.01.10.0008.	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	(208.585.918,00)	(166.654.433,00)
1.3.07.01.18.0003.	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	(2.000.000,00)	(2.000.000,00)
1.3.07.02.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(480.583.401,00)	(436.910.544,00)
1.3.07.02.01.0001.	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(378.883,00)	(378.883,00)
1.3.07.02.01.0030.	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(480.204.518,00)	(436.531.661,00)
1.5.	ASET LAINNYA	99.060.901,88	99.060.901,88
1.5.04.	Aset Lain-lain	484.157.888,63	529.157.888,63
1.5.04.01.	Aset Lain-lain	484.157.888,63	529.157.888,63
1.5.04.01.01.0001.	Aset Rusak Berat/Usang	484.157.888,63	529.157.888,63
1.5.06.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(385.096.986,75)	(430.096.986,75)
1.5.06.01.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(385.096.986,75)	(430.096.986,75)
1.5.06.01.01.0002.	Akumulasi penyusutan aset lain-lain	(385.096.986,75)	(430.096.986,75)
	JUMLAH ASET	2.779.680.052,58	3.529.162.792,12
2.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.024.592.972,00	602.067.315,00
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.024.592.972,00	602.067.315,00
2.1.06.	Utang Belanja	1.024.592.972,00	602.067.315,00
2.1.06.01.	Utang Belanja Pegawai	205.169.381,00	233.206.855,00
2.1.06.01.01.	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	18.187.141,00	24.329.355,00
2.1.06.01.01.0001.	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	18.187.141,00	24.329.355,00
2.1.06.01.02.	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	136.152.240,00	208.877.500,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	
		2024	2023
1	2	3	4
2.1.06.01.02.0001.	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	78.984.000,00	167.264.000,00
2.1.06.01.02.0009.	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	57.168.240,00	41.613.500,00
2.1.06.01.03.	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	50.830.000,00	0
2.1.06.01.03.0051.	Utang Belanja Honorarium-Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	48.430.000,00	0
2.1.06.01.03.0055.	Utang Belanja Jasa Pengelolaan BMD-Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	2.400.000,00	0
2.1.06.02.	Utang Belanja Barang dan Jasa	819.423.591,00	368.860.460,00
2.1.06.02.01.	Utang Belanja Barang	141.332.000,00	27.729.760,00
2.1.06.02.01.0004.	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.250.000,00	0
2.1.06.02.01.0026.	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	37.350.000,00	3.329.760,00
2.1.06.02.01.0027.	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	0	300.000,00
2.1.06.02.01.0036.	Utang Belanja barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	14.532.000,00	0
2.1.06.02.01.0052.	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat	88.200.000,00	24.100.000,00
2.1.06.02.02.	Utang Belanja Jasa	490.661.591,00	305.923.200,00
2.1.06.02.02.0003.	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	25.000.000,00	4.550.000,00
2.1.06.02.02.0014.	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	49.209.000,00	0
2.1.06.02.02.0026.	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi	300.200.000,00	229.500.000,00
2.1.06.02.02.0030.	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan	24.000.000,00	12.600.000,00
2.1.06.02.02.0031.	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Keamanan	24.000.000,00	12.600.000,00
2.1.06.02.02.0033.	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Supir	19.200.000,00	14.400.000,00
2.1.06.02.02.0039.	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	39.000.000,00	29.250.000,00
2.1.06.02.02.0060.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	55.000,00	42.000,00
2.1.06.02.02.0061.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	4.943.251,00	317.200,00
2.1.06.02.02.0063.	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.054.340,00	1.164.000,00
2.1.06.02.02.634.	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0	1.500.000,00
2.1.06.02.03.	Utang Belanja Pemeliharaan	0	19.702.500,00
2.1.06.02.03.544.	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Kantor	0	19.702.500,00
2.1.06.02.04.	Utang Belanja Perjalanan Dinas	187.430.000,00	15.505.000,00
2.1.06.02.04.0003.	Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri-- Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.500.000,00	3.105.000,00
2.1.06.02.04.0004.	Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri-- Utang Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	184.930.000,00	12.400.000,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	1.024.592.972,00	602.067.315,00
3.	EKUITAS	1.755.087.080,58	2.927.095.477,12
3.1.	EKUITAS	1.755.087.080,58	2.927.095.477,12

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	
		2024	2023
1	2	3	4
3.1.01.	Ekuitas	(6.166.932.700,42)	2.927.095.477,12
3.1.01.01.	Ekuitas	2.927.095.477,12	2.927.095.477,12
3.1.01.01.01.	Ekuitas	2.927.095.477,12	2.927.095.477,12
3.1.01.01.01.0001.	Ekuitas	2.927.095.477,12	2.927.095.477,12
3.1.01.02.	Surplus/Defisit-LO	(9.094.028.177,54)	0
3.1.01.02.01.	Surplus/Defisit-LO	(9.094.028.177,54)	0
3.1.01.02.01.0001.	Surplus/Defisit-LO	(9.094.028.177,54)	0
3.1.03.	RK PPKD	7.922.019.781,00	0
3.1.03.01.	RK PPKD	7.922.019.781,00	0
3.1.03.01.01.	RK PPKD	7.922.019.781,00	0
3.1.03.01.01.0001.	RK PPKD	8.417.570.661,00	0
3.1.03.01.01.0003.	RK Mutasi Keluar	(495.550.880,00)	0
3.2	JUMLAH EKUITAS	1.755.087.080,58	2.927.095.477,12
3.22	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.779.680.052,58	3.529.162.792,12


Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

H. DANI HAMDANI, S.Sos., MM
NIP. 196504171990031013



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 dan 2023

SKPD : DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

(Dalam rupiah)

REKENING	URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
7.	PENDAPATAN DAERAH-LO	499.328.655,00	501.929.237,00	(2.600.582,00)	(0,52)
7.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO	499.328.655,00	501.929.237,00	(2.600.582,00)	(0,52)
7.3.01.	Pendapatan Hibah-LO	499.328.655,00	501.929.237,00	(2.600.582,00)	(0,52)
7.3.01.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	499.328.655,00	501.929.237,00	(2.600.582,00)	(0,52)
7.3.01.01.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	499.328.655,00	501.929.237,00	(2.600.582,00)	(0,52)
7.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	499.328.655,00	501.929.237,00	(2.600.582,00)	(0,52)
7.3.Z	J U M L A H L A I N - L A I N PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO	499.328.655,00	501.929.237,00	(2.600.582,00)	(0,52)
7.Z	JUMLAH PENDAPATAN	499.328.655,00	501.929.237,00	(2.600.582,00)	(0,52)
8.	BEBAN DAERAH	9.593.356.832,54	10.343.230.989,41	(749.874.156,87)	(7,25)
8.1.	BEBAN OPERASI	8.911.696.961,54	9.540.082.364,41	(628.385.402,87)	(6,59)
8.1.01.	Beban Pegawai	2.498.302.595,00	2.360.749.237,00	137.553.358,00	5,83
8.1.01.01.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.378.154.365,00	1.380.739.447,00	(2.585.082,00)	(0,19)
8.1.01.01.01.	Beban Gaji Pokok ASN	1.017.726.213,00	1.013.873.280,00	3.852.933,00	0,38
8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	1.017.726.213,00	1.013.873.280,00	3.852.933,00	0,38
8.1.01.01.02.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	98.204.222,00	94.054.078,00	4.150.144,00	4,41
8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	98.204.222,00	94.054.078,00	4.150.144,00	4,41
8.1.01.01.03.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	139.890.000,00	150.330.000,00	(10.440.000,00)	(6,94)
8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	139.890.000,00	150.330.000,00	(10.440.000,00)	(6,94)
8.1.01.01.05.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	15.540.000,00	15.540.000,00	0,00	0,00
8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	15.540.000,00	15.540.000,00	0,00	0,00
8.1.01.01.06.	Beban Tunjangan Beras ASN	51.345.780,00	51.490.620,00	(144.840,00)	(0,28)
8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	51.345.780,00	51.490.620,00	(144.840,00)	(0,28)
8.1.01.01.07.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.757.829,00	3.465.849,00	291.980,00	8,42
8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.757.829,00	3.465.849,00	291.980,00	8,42
8.1.01.01.08.	Beban Pembulatan Gaji ASN	12.431,00	14.337,00	(1.906,00)	(13,29)
8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	12.431,00	14.337,00	(1.906,00)	(13,29)
8.1.01.01.09.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	43.386.447,00	43.697.651,00	(311.204,00)	(0,71)
8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	43.386.447,00	43.697.651,00	(311.204,00)	(0,71)
8.1.01.01.10.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.072.843,00	2.068.421,00	4.422,00	0,21
8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.072.843,00	2.068.421,00	4.422,00	0,21
8.1.01.01.11.	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	6.218.600,00	6.205.211,00	13.389,00	0,22
8.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	6.218.600,00	6.205.211,00	13.389,00	0,22

REKENING	URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.01.02.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	887.108.230,00	881.529.790,00	5.578.440,00	0,63
8.1.01.02.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	581.298.000,00	704.838.400,00	(123.540.400,00)	(17,53)
8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	581.298.000,00	704.838.400,00	(123.540.400,00)	(17,53)
8.1.01.02.03.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	0,00	1.009.600,00	(1.009.600,00)	(100,00)
8.1.01.02.03.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	0,00	1.009.600,00	(1.009.600,00)	(100,00)
8.1.01.02.05.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	305.810.230,00	175.681.790,00	130.128.440,00	74,07
8.1.01.02.05.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	305.810.230,00	175.681.790,00	130.128.440,00	74,07
8.1.01.03.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	233.040.000,00	98.480.000,00	134.560.000,00	136,64
8.1.01.03.07.	Beban Honorarium	223.440.000,00	92.880.000,00	130.560.000,00	140,57
8.1.01.03.07.0001	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	223.440.000,00	92.880.000,00	130.560.000,00	140,57
8.1.01.03.08.	Beban Jasa Pengelolaan BMD	9.600.000,00	5.600.000,00	4.000.000,00	71,43
8.1.01.03.08.0002	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	9.600.000,00	5.600.000,00	4.000.000,00	71,43
8.1.02.	Beban Barang dan Jasa	6.413.394.366,54	7.178.833.127,41	(765.438.760,87)	(10,66)
8.1.02.01.	Beban Barang	1.827.565.838,54	2.209.666.266,41	(382.100.427,87)	(17,29)
8.1.02.01.01.	Beban Barang Pakai Habis	1.827.565.838,54	2.209.666.266,41	(382.100.427,87)	(17,29)
8.1.02.01.01.0001	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	4.910.000,00	(4.910.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	33.750.000,00	17.751.440,00	15.998.560,00	90,13
8.1.02.01.01.0012	Beban Bahan-Bahan Lainnya	0,00	3.897.173,00	(3.897.173,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0013	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	10.139.200,00	6.799.077,00	3.340.123,00	49,13
8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	42.722.601,00	90.063.646,34	(47.341.045,34)	(52,56)
8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	192.153.800,00	280.004.350,00	(87.850.550,00)	(31,37)
8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.360.000,00	1.900.000,00	(540.000,00)	(28,42)
8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	58.006,00	2.700.000,00	(2.641.994,00)	(97,85)
8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	452.700,00	1.161.532,00	(708.832,00)	(61,03)
8.1.02.01.01.0035	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	0,00	38.250.000,00	(38.250.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	59.765.703,00	21.506.402,00	38.259.301,00	177,90
8.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat	0,00	114.800,00	(114.800,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0040	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	368.733.828,54	429.121.426,07	(60.387.597,53)	(14,07)
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	1.112.180.000,00	1.202.004.500,00	(89.824.500,00)	(7,47)
8.1.02.01.01.0058	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	6.250.000,00	12.500.000,00	(6.250.000,00)	(50,00)
8.1.02.01.01.0064	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	79.481.920,00	(79.481.920,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0074	Beban Pakaian Adat Daerah	0,00	17.500.000,00	(17.500.000,00)	(100,00)

REKENING	URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02.02.	Beban Jasa	1.789.380.500,00	2.133.739.203,00	(344.358.703,00)	(16,14)
8.1.02.02.01.	Beban Jasa Kantor	1.525.330.500,00	2.015.941.703,00	(490.611.203,00)	(24,34)
8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	152.250.000,00	169.300.000,00	(17.050.000,00)	(10,07)
8.1.02.02.01.0004	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	138.700.000,00	(138.700.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0014	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	608.544.000,00	559.500.000,00	49.044.000,00	8,77
8.1.02.02.01.0025	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	5.000.000,00	7.500.000,00	(2.500.000,00)	(33,33)
8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	397.050.000,00	615.450.000,00	(218.400.000,00)	(35,49)
8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	75.200.000,00	141.600.000,00	(66.400.000,00)	(46,89)
8.1.02.02.01.0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan	75.200.000,00	141.600.000,00	(66.400.000,00)	(46,89)
8.1.02.02.01.0033	Beban Jasa Tenaga Supir	28.800.000,00	38.400.000,00	(9.600.000,00)	(25,00)
8.1.02.02.01.0039	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	58.500.000,00	78.000.000,00	(19.500.000,00)	(25,00)
8.1.02.02.01.0047	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	13.500.000,00	16.000.000,00	(2.500.000,00)	(15,63)
8.1.02.02.01.0055	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	5.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)
8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	527.000,00	504.000,00	23.000,00	4,56
8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	24.850.881,00	23.789.373,00	1.061.508,00	4,46
8.1.02.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	11.696.000,00	6.684.000,00	5.012.000,00	74,99
8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	60.255.819,00	58.804.330,00	1.451.489,00	2,47
8.1.02.02.01.0064	Beban Paket/Pengiriman	0,00	109.000,00	(109.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	8.956.800,00	10.001.000,00	(1.044.200,00)	(10,44)
8.1.02.02.05.	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	128.000.000,00	137.500.000,00	(9.500.000,00)	(6,91)
8.1.02.02.05.0001	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	124.000.000,00	126.000.000,00	(2.000.000,00)	(1,59)
8.1.02.02.05.0009	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.000.000,00	8.500.000,00	(5.500.000,00)	(64,71)
8.1.02.02.05.0043	Beban Sewa Hotel	1.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	(66,67)
8.1.02.02.08.	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	(19.702.500,00)	19.702.500,00	(100,00)
8.1.02.02.08.0002	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	0,00	(19.702.500,00)	19.702.500,00	(100,00)
8.1.02.02.09.	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	136.050.000,00	0,00	136.050.000,00	100,00
8.1.02.02.09.0012	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	136.050.000,00	0,00	136.050.000,00	100,00
8.1.02.03.	Beban Pemeliharaan	22.006.000,00	43.702.500,00	(21.696.500,00)	(49,65)
8.1.02.03.02.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	22.006.000,00	23.000.000,00	(994.000,00)	(4,32)
8.1.02.03.02.0035	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	13.756.000,00	11.000.000,00	2.756.000,00	25,05
8.1.02.03.02.121.	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	750.000,00	1.500.000,00	(750.000,00)	(50,00)
8.1.02.03.02.405.	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	7.500.000,00	10.500.000,00	(3.000.000,00)	(28,57)

REKENING	URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02.03.03.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	19.702.500,00	(19.702.500,00)	(100,00)
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	19.702.500,00	(19.702.500,00)	(100,00)
8.1.02.03.05.	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(100,00)
8.1.02.03.05.0028	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(100,00)
8.1.02.04.	Beban Perjalanan Dinas	2.769.192.028,00	2.786.475.158,00	(17.283.130,00)	(0,62)
8.1.02.04.01.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.769.192.028,00	2.786.475.158,00	(17.283.130,00)	(0,62)
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	53.109.028,00	97.578.158,00	(44.469.130,00)	(45,57)
8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	22.193.000,00	26.912.000,00	(4.719.000,00)	(17,53)
8.1.02.04.01.0004	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.693.890.000,00	2.661.985.000,00	31.905.000,00	1,20
8.1.02.05.	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00
8.1.02.05.01.	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00
8.1.02.05.01.0002	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00
8.1.06.	Beban Bantuan Sosial	0,00	500.000,00	(500.000,00)	(100,00)
8.1.06.01.	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	0,00	500.000,00	(500.000,00)	(100,00)
8.1.06.01.01.	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	0,00	500.000,00	(500.000,00)	(100,00)
8.1.06.01.01.0001	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	0,00	500.000,00	(500.000,00)	(100,00)
8.2.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	681.659.871,00	803.148.625,00	(121.488.754,00)	(15,13)
8.2.01.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	637.987.014,00	767.848.950,00	(129.861.936,00)	(16,91)
8.2.01.02.	Beban Penyusutan Alat Angkutan	366.350.511,00	445.912.667,00	(79.562.156,00)	(17,84)
8.2.01.02.01.	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	366.350.511,00	445.912.667,00	(79.562.156,00)	(17,84)
8.2.01.02.01.0009	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	366.350.511,00	445.912.667,00	(79.562.156,00)	(17,84)
8.2.01.04.	Beban Penyusutan Alat Pertanian	0,00	13.002.000,00	(13.002.000,00)	(100,00)
8.2.01.04.01.	Beban Penyusutan Alat Pengolahan	0,00	13.002.000,00	(13.002.000,00)	(100,00)
8.2.01.04.01.0010	Beban Penyusutan Alat Pengolahan Lainnya	0,00	13.002.000,00	(13.002.000,00)	(100,00)
8.2.01.05.	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	44.796.955,00	41.890.081,00	2.906.874,00	6,94
8.2.01.05.01.	Beban Penyusutan Alat Kantor	30.492.724,00	32.778.390,00	(2.285.666,00)	(6,97)
8.2.01.05.01.0005	Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya	30.492.724,00	32.778.390,00	(2.285.666,00)	(6,97)
8.2.01.05.02.	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	12.532.356,00	8.060.816,00	4.471.540,00	55,47
8.2.01.05.02.0006	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	12.532.356,00	8.060.816,00	4.471.540,00	55,47
8.2.01.05.03.	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.771.875,00	1.050.875,00	721.000,00	68,61

REKENING	URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.2.01.05.03.0008	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.771.875,00	1.050.875,00	721.000,00	68,61
8.2.01.06.	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	46.740.000,00	46.773.333,00	(33.333,00)	(0,07)
8.2.01.06.02.	Beban Penyusutan Alat Komunikasi	46.740.000,00	46.773.333,00	(33.333,00)	(0,07)
8.2.01.06.02.0011	Beban Penyusutan Alat Komunikasi Lainnya	46.740.000,00	46.773.333,00	(33.333,00)	(0,07)
8.2.01.07.	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.534.583,00	4.345.000,00	(1.810.417,00)	(41,67)
8.2.01.07.01.	Beban Penyusutan Alat Kedokteran	2.534.583,00	4.345.000,00	(1.810.417,00)	(41,67)
8.2.01.07.01.0029	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Lainnya	2.534.583,00	4.345.000,00	(1.810.417,00)	(41,67)
8.2.01.10.	Beban Penyusutan Komputer	177.564.965,00	215.925.869,00	(38.360.904,00)	(17,77)
8.2.01.10.01.	Beban Penyusutan Komputer Unit	135.633.480,00	170.295.588,00	(34.662.108,00)	(20,35)
8.2.01.10.01.0003	Beban Penyusutan Komputer Unit Lainnya	135.633.480,00	170.295.588,00	(34.662.108,00)	(20,35)
8.2.01.10.02.	Beban Penyusutan Peralatan Komputer	41.931.485,00	45.630.281,00	(3.698.796,00)	(8,11)
8.2.01.10.02.0005	Beban Penyusutan Peralatan Komputer Lainnya	41.931.485,00	45.630.281,00	(3.698.796,00)	(8,11)
8.2.02.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	43.672.857,00	35.299.675,00	8.373.182,00	23,72
8.2.02.01.	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	43.672.857,00	35.299.675,00	8.373.182,00	23,72
8.2.02.01.01.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	43.672.857,00	35.299.675,00	8.373.182,00	23,72
8.2.02.01.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	0,00	378.883,00	(378.883,00)	(100,00)
8.2.02.01.01.300.	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	43.672.857,00	34.920.792,00	8.752.065,00	25,06
8.Z	JUMLAH BEBAN	9.593.356.832,54	10.343.230.989,41	(749.874.156,87)	(7,25)
	SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI	(9.094.028.177,54)	(9.841.301.752,41)	747.273.574,87	(7,59)

Parigi, 31 Desember 2024
Pengguna Anggaran

H. DANI HAMDANI, S.Sos., MM
NIP. NIP. 196504171990031013

PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	2,927,095,477.12	2,927,095,477.12
Surplus/Defisit-LO	(9,094,028,177.54)	0.00
RK PPKD	8,417,570,661.00	0.00
RK Mutasi Keluar	(495,550,880.00)	0.00
JUMLAH EKUITAS AKHIR	1,755,087,080.58	2,927,095,477.12

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
LAPORAN KEUANGAN POKOK	
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	
NERACA	
LAPORAN OPERASIONAL	
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan	1
1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan	2
1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan	3
BAB II EKONOMI MAKRO dan KEBIJAKAN KEUANGAN SKPD	4
2.1. Ekonomi makro	4
2.2. Kebijakan Keuangan	4
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	5
3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian terget kinerja keuangan	5
3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.....	10
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	11
4.1. Entitas Pelaporan keuangan daerah	11
4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan	11
4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan	11
4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan	15
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	20
5.1. Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	20
5.2. Pos – Pos Neraca	26
5.3. Pos Pos laporan Operasional (LO)	41
5.4. Pos - Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	47
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	48
6.1 Struktur Organisasi	48
6.2 Sumber Daya Manusia	48
BAB VII PENUTUP	50
 LAMPIRAN	
1 SPJ BELANJA – FUNGSIONAL	
2 BUKU KAS UMUM	
3 REGISTER STS	
4 REKENING KORAN	

- 5 BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN FISIK BARANG PERSEDIAAN PER 31 DESEMBER 2024
- 6 BERITA ACARA INVENTARISASI BARANG DAERAH PER 31 DESEMBER 2024

DAFTAR TABEL

Tabel 1 - Rincian Realisasi dan Kinerja Keuangan s.d Bulan Desember Tahun 2024	5
Tabel 2 - Anggaran dan Realisasi Belanja s.d Bulan Desember 2024 dan 2023	20
Tabel 3 - Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi s.d Bulan Desember 2024 dan 2023	21
Tabel 4 - Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai s.d Bulan Desember 2024 dan 2023	21
Tabel 5 - Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa s.d Bulan Desember 2024 dan 2023	21
Tabel 6 - Anggaran dan Realisasi Belanja Barang s.d Bulan Desember 2024 dan 2023	22
Tabel 7 - Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa s.d Bulan Desember 2024 dan 2023	23
Tabel 8 - Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan s.d Bulan Desember 2024 dan 2023	23
Tabel 9 - Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas s.d Bulan Desember 2024 dan 2023	23
Tabel 10 - Anggaran dan Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat s.d Bulan Desember 2024 dan 2023	24
Tabel 11 - Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial s.d Bulan Desember 2024 dan 2023	24
Tabel 12 - Anggaran dan Realisasi Belanja Modal s.d Bulan Desember 2024 dan 2023	25
Tabel 13 - Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin s.d Bulan Desember 2024 dan 2023	25
Tabel 14 - Saldo Aset s.d Bulan Desember 2024 dan 2023	26
Tabel 15 - Saldo Aset Lancar s.d Bulan Desember 2024 dan 2023	26
Tabel 16 - Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023	27
Tabel 17 - Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023	27
Tabel 18 - Rincian Mutasi Aset Tetap Tahun 2024 dan 2023	28
Tabel 19 - Rincian Mutasi Aset Tetap Tahun 2024 dan 2023	29
Tabel 20 - Rincian Mutasi Aset Tetap Tahun 2024 dan 2023	29
Tabel 21 - Rincian Mutasi Aset Tetap Tahun 2024 dan 2023	30
Tabel 22 - Rincian Penyusutan Aset Tetap Tahun 2024	31

Tabel 23 - Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023	31
Tabel 24 - Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023	32
Tabel 25 - Rincian Mutasi Aset Lain-lain per 31 Desember 2024	32
Tabel 26 - Rincian Mutasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024	32
Tabel 27 - Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 2023	33
Tabel 28 - Rincian Utang Belanja per 31 Desember 2024 dan 2023	33
Tabel 29 - Rincian Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2024	34
Tabel 30 - Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2024	34
Tabel 31 - Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023	40
Tabel 32 - Rincian Pendapatan Operasional Tahun 2024 dan 2023	41
Tabel 33 - Rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2024 dan 2023	41
Tabel 34 - Rincian Pendapatan Hibah Tahun 2024 dan 2023	42
Tabel 35 - Rincian Beban Operasional Tahun 2024 dan 2023	42
Tabel 36 - Rincian Beban Pegawai Tahun 2024 dan 2023	43
Tabel 37 - Rincian Beban Persediaan per Perangkat Daerah Tahun 2024 dan 2023	43
Tabel 38 - Rincian Beban Jasa Tahun 2024 dan 2023	44
Tabel 39 - Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan 2023	44
Tabel 40 - Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan 2023	45
Tabel 41 - Rincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2024 dan 2023	45
Tabel 42 - Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dan 2023	46
Tabel 43 - Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dan 2023	46
Tabel 44 - Rincian Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2024 dan 2023	47
Tabel 45 - Rincian Pegawai	48
Tabel 46 - Rincian Pegawai Definitif	49



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Perundangan Bidang Pengelolaan Keuangan Negara yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah dan seiring dengan paradigma penyelenggaraan pemerintahan saat ini, upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik merupakan suatu tuntutan sehingga sudah menjadi komitmen bersama yang harus dibangun segenap komponen pemerintahan agar pelayanan pada masyarakat dapat dioptimalkan.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah harus memperhatikan tingkat efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan otonomi daerah tersebut dengan memperhatikan hubungan pemerintah pusat-daerah, antar pemerintah daerah serta potensi daerah itu sendiri. Salah satu diantaranya yang memegang peranan penting adalah aspek keuangan daerah. Aspek Keuangan Daerah meliputi penggalan potensi, fungsi alokasi, kualitas pengelolaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah.

Aspek pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Pangandaran pada periode Tahun 2024 telah mengacu ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam aspek pengelolaan keuangan daerah tersebut, terutama dalam pelaksanaan dan pelaporan APBD Tahun Anggaran 2024 tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan tersebut maka seluruh SKPD sudah menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan anggarannya masing-masing.

Adapun maksud dari penyusunan Laporan Keuangan ini adalah:

- a. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran adalah untuk memenuhi ketentuan Peraturan Perundangan Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.
- b. Untuk menyajikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas.
- c. Untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan yang meliputi realisasi anggaran, neraca, arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih dan kinerja keuangan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Sedangkan tujuan penyusunan laporan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
- h. Untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran atas pelaksanaan APBD Tahun 2022 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran;
- l. Peraturan Bupati Pemerintah Kabupaten Pangandaran Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bab I Pendahuluan

- 1.4. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.5. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.6. Sistematisasi penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II Ekonomi makro dan kebijakan keuangan SKPD

- 2.3. Ekonomi makro
- 2.4. Kebijakan keuangan

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan akuntansi

- 4.5. Entitas pelaporan keuangan daerah
- 4.6. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.7. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.8. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan

- 5.1 Pos – Pos Neraca Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 5.2. Pos – Pos Neraca
- 5.4. Pos – Pos Laporan Operasional (LO)
- 5.5. Pos – Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN SKPD

2.1. EKONOMI MAKRO

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 bahwa perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa kepada Daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah.

Sejalan dengan pembagian kewenangan yang disebutkan di atas, maka pengaturan pembiayaan Daerah dilakukan berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD, sedangkan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN, dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas pembantuan dibiayai atas beban anggaran tingkat pemerintahan yang menugaskan.

2.1. KEBIJAKAN KEUANGAN

Kebijakan keuangan Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran yang dijabarkan dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan tercermin dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran.

Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2024 dijelaskan keuangannya mencakup unsur Belanja yang terdiri dari:

1. Belanja Operasi, yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja pemeliharaan
2. Belanja Modal, yaitu belanja modal peralatan dan mesin.

Belanja tersebut dialokasikan untuk melaksanakan program dan kegiatan Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun Anggran 2024.



BAB III

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

3.1.1 Realisasi dan Rencana Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan

Program Belanja Daerah Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 9.854.432.821,00 terealisasi sampai 31 Desember 2024 sebesar Rp. 8.417.570.661,00. Struktur Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah sudah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam Catatan Atas Laporan Keuangan harus menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang berisi gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan selama pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024.

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan tersebut diambil dari tabel pengukuran kinerja kegiatan dengan pengelompokan berdasar pada urusan wajib dan pilihan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas.

Adapun uraian kinerja program dan kegiatan disajikan dalam lampiran laporan keuangan ini sesuai dengan Laporan Akuntabilitas Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran yaitu Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan, sebagai berikut :

Tabel 1 - Rincian Realisasi dan Kinerja Keuangan s.d Bulan Desember Tahun 2024

KODE						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)
						DKBP3A	9.954.432.821,00	8.417.570.661,00	84,56
2	08					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.995.163.121,00	3.238.420.292,00	81,06
2	08	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.418.497.381,00	2.909.407.324,00	85,11
2	08	01	2	01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.350.000,00	23.250.000,00	44,41
2	08	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	52.350.000,00	23.250.000,00	44,41
2	08	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.761.939.000,00	2.495.090.069,00	90,34
2	14	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.733.289.000,00	2.482.340.069,00	90,82
2	08	01	2	02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	28.650.000,00	12.750.000,00	44,50
2	08	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	28.650.000,00	12.750.000,00	44,50

KODE						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)
2	08	01	2	03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	28.650.000,00	12.750.000,00	44,50
2	08	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	47.400.000,00	21.000.000,00	44,30
2	08	01	2	05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	47.400.000,00	21.000.000,00	44,30
2	08	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	161.186.811,00	84.894.415,00	52,67
2	08	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.556.245,00	-	0,00
2	08	01	2	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.997.940,00	48.984.450,00	99,97
2	08	01	2	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.231.550,00	2.868.965,00	46,04
2	08	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.716.876,00	1.595.000,00	16,41
2	08	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.879.200,00	11.696.000,00	84,27
2	08	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.805.000,00	19.750.000,00	26,05
2	08	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00
2	08	01	2	07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00
2	08	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	163.439.325,00	86.320.840,00	52,82
2	08	01	2	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	960.000,00	19,20
2	08	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	33.339.325,00	24.260.840,00	72,77
2	08	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	125.100.000,00	61.100.000,00	48,84
2	08	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.532.245,00	66.102.000,00	79,13
2	08	01	2	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.342.445,00	30.718.400,00	92,13
2	08	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.189.800,00	27.133.600,00	77,11
2	08	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00	8.250.000,00	55,00
2	08	02				PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	186.837.720,00	159.257.720,00	85,24
2	08	02	2	01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	17.400.000,00	4.200.000,00	24,14
2	08	02	2	01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	17.400.000,00	4.200.000,00	24,14
2	08	02	2	02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	169.437.720,00	155.057.720,00	91,51
2	08	02	2	02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi	147.937.800,00	133.557.800,00	90,28
						Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik Hukum Sosial dan Ekonomi	21.499.920,00	21.499.920,00	100,00
2	08	03				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	21.290.380,00	12.211.380,00	57,36

KODE						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)
2	08	03	2	01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	7.856.380,00	6.356.380,00	80,91
2	08	03	2	01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	7.856.380,00	6.356.380,00	80,91
2	08	03	2	02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	13.434.000,00	5.855.000,00	43,58
2	08	03	2	02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	13.434.000,00	5.855.000,00	43,58
2	08	04				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	280.183.600,00	100.183.600,00	35,76
2	08	04	2	01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	280.183.600,00	100.183.600,00	35,76
						Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10.183.600,00	10.183.600,00	100,00
2	08	04	2	01	0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	270.000.000,00	90.000.000,00	33,33
2	08	06				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	68.040.000,00	37.046.228,00	54,45
2	08	06	2	02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	68.040.000,00	37.046.228,00	54,45
2	08	06	2	02	0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	12.560.000,00	6.728.428,00	53,57
2	08	06	2	02	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	55.480.000,00	30.317.800,00	54,65
2	08	07				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	20.314.040,00	20.314.040,00	100,00
2	08	07	2	1		Pencegahan Kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota	20.314.040,00	20.314.040,00	100,00
2	08	07	2	1	0004	Advokasi dan pendampingan perangkat daerah dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA	20.314.040,00	20.314.040,00	100,00
2	14					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5.959.269.700,00	5.179.150.369,00	86,91
2	14	02				PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	424.150.000,00	363.037.469,00	85,59
2	14	02	2	01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	167.950.000,00	136.050.000,00	81,01
2	14	02	2	01	0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	136.050.000,00	136.050.000,00	100,00

KODE						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)
2	14	02	2	01	0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	21.100.000,00	-	0,00
2	14	02	2	01	0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	10.800.000,00	-	0,00
2	14	02	2	02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	256.200.000,00	226.987.469,00	88,60
2	14	02	2	02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	60.000.000,00	55.144.000,00	91,91
2	14	02	2	02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	76.200.000,00	74.500.000,00	97,77
2	14	02	2	02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	120.000.000,00	97.343.469,00	81,12
2	14	03				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.098.654.700,00	2.419.160.700,00	78,07
2	14	03	2	01		Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.300.013.700,00	906.289.700,00	69,71
2	14	03	2	01	0008	Pengendalian Program KKBPK	503.000.000,00	252.100.000,00	50,12
2	14	03	2	01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	338.289.700,00	253.789.700,00	75,02
2	14	03	2	01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam) Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	158.724.000,00	139.000.000,00	87,57
2	14	03	2	01	0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	100.000.000,00	61.400.000,00	61,40
2	14	03	2	01	0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
2	14	03	2	02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	279.000.000,00	223.200.000,00	80,00
2	14	03	2	02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	279.000.000,00	223.200.000,00	80,00
2	14	03	2	03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.027.391.000,00	878.021.000,00	85,46
2	14	03	2	03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	8.500.000,00	5.754.000,00	67,69
2	14	03	2	03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.006.191.000,00	862.167.000,00	85,69
2	14	03	2	03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12.700.000,00	10.100.000,00	79,53
2	14	03	2	04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	492.250.000,00	411.650.000,00	83,63
2	14	03	2	04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	3.750.000,00	3.750.000,00	100,00

KODE						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)
2	14	03	2	04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	488.500.000,00	407.900.000,00	83,50
2	14	04				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.436.465.000,00	2.396.952.200,00	98,38
2	14	04	2	01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	363.365.000,00	336.983.000,00	92,74
2	14	04	2	01	0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat Generasi Berencana Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	52.889.000,00	31.307.000,00	59,19
2	14	04	2	01	0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	19.200.000,00	14.400.000,00	75,00
2	14	04	2	01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPKS PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	291.276.000,00	291.276.000,00	100,00
2	14	04	2	02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.073.100.000,00	2.059.969.200,00	99,37
2	14	04	2	02	0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	13.000.000,00	-	0,00
2	14	04	2	02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS Ibu Hamil Pasca salin/kelahiran Baduta/Balita)	981.000.000,00	981.000.000,00	100,00
2	14	04	2	02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS Ibu Hamil Pasca salin/kelahiran Baduta/Balita)	1.079.100.000,00	1.078.969.200,00	99,99

3.1.2 Perbandingan Realisasi Antar Periode

3.1.2.1 Pendapatan

Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran merupakan salah satu SKPD yang tidak menghasilkan atau mengelola Pendapatan, sehingga di Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran tidak terdapat anggaran maupun realisasi Pendapatan pada Tahun Anggaran 2024.

3.1.2.2 Belanja

Realisasi Belanja pada Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp.8.417.570.661,00 dari pagu sebesar Rp. 9.854.432.821,00 sedangkan realisasi Tahun

2023 dengan pagu Rp. 10.423.057.892,00 terealisasi sampai 31 Desember 2023 sebesar Rp. 9.453.635.898,00.

3.1.2.3 Pembiayaan

Pembiayaan khusus bagi SKPKD, Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak berkompeten dalam hal Pembiayaan.

3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

3.2.1. Hambatan

Secara umum permasalahan yang masih dihadapi oleh SKPD Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu pemahaman aparatur tentang perencanaan dan penganggaran belum maksimal dan tata kelola administrasi pengelolaan keuangan belum optimal.

3.2.2. Pemecahan Masalah

Untuk kelancaran pelaksanaan pelaporan keuangan kedepannya, diupayakan :

1. Pelatihan tentang sinergitas perencanaan dan penganggaran bagi aparatur/ pelaksana teknis kegiatan.
2. Perlu adanya evaluasi secara bertahap/ berjenjang tentang administrasi pengelola keuangan bagi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Teknis Kegiatan.



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Struktur dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran sudah mengacu pada Permendagri No. 13 Tahun 2006, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah. Entitas pelaporan dalam Laporan Keuangan ini adalah Bupati sebagai Kepala Daerah yang menurut ketentuan peraturan perundangan wajib menyampaikan laporan keuangan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006, Permendagri Nomor 21 tahun 2011 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tersebut bahwa pertanggungjawaban Bupati sebagai Kepala Daerah adalah berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran adalah basis akrual penuh sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Dimana untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih masih menganut basis kas sedangkan basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban-LO, Surplus/defisit-LO, aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas.

- (a) **Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran**, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.
- (b) **Basis akrual untuk Neraca**, berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.
- (c) **Basis akrual untuk Laporan Operasional**, berarti bahwa pendapatan, belanja, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- (d) **Asas Bruto**, berarti pengakuan serta pencatatannya tidak diperkenankan secara netto, penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi.

4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Beberapa informasi penting yang perlu disajikan, sehubungan dengan basis pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Neraca Pemerintah Kabupaten Pangandaran menganut Substansi mengungguli bentuk formalnya (*substance over form*).

- 2) Asas yang digunakan adalah akrual yang dimodifikasi (*modified accrual basis*) / kas yang dimodifikasi (*modified cash basis*) dan basis akrual penuh (*accrual basis*).
- 3) Periode Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Neraca Kabupaten Pangandaran adalah tahun anggaran (1 Januari sampai dengan 30 Desember 2022).
- 4) Aktiva adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai serta dapat diukur dalam satuan uang. Tidak termasuk dalam pengertian sumber daya ekonomis adalah sumber daya alam seperti hutan, sungai, danau/rawa, kekayaan di dasar laut, kandungan pertambangan dan harta peninggalan sejarah seperti candi.
- 5) Rekening yang digunakan dalam Laporan Keuangan sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan juga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Daerah.
- 6) Kas
 - Pencatatan Kas menggunakan asas dasar kas.
 - Kas di bendahara dinyatakan dalam rupiah. Jika terdapat kas dalam valuta asing maka harus dikonversikan berdasarkan nilai kurs pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun, kas di bendahara dalam valuta asing dikonversi kedalam rupiah menggunakan kurs pada tanggal neraca.
 - Nilai kas pada tanggal neraca adalah hasil Kas Opname di masing-masing bendahara.
- 7) Piutang
 - Piutang adalah hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi.
 - Piutang adalah transaksi yang terjadi antara Pemda dengan pihak ketiga, dapat berupa penjualan barang, kewajiban kepada Pemda yang belum dilunasi, seperti pajak/retribusi atau pinjaman uang yang belum dilunasi pada saat pencatatan.
 - Piutang dinilai sebesar nilai nominal.
 - Pengakuan Piutang Pajak/Retribusi dicatat atas dasar adanya ketetapan pajak/retribusi yang telah diterbitkan.
- 8) Persediaan
 - Persediaan adalah barang yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat
 - Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan. Persediaan dinilai dalam neraca dengan cara :
 - Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian
 - Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri
 - Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
 - Jenis-jenis persediaan :
 - Persediaan Habis Pakai, adalah barang-barang yang bekas penggunaannya tidak dapat digunakan kembali, misalnya ATK.
 - Persediaan Tak Habis Pakai, adalah persediaan yang dapat digunakan berulang kali, misal *file box*.
 - Persediaan Bekas Pakai adalah persediaan bekas pakai yang masih dapat digunakan.
 - Persediaan untuk dijual atau diserahkan misal aspal dalam drum, obat-obatan, alat-alat kedokteran, bibit, benih ikan dan lainn sebagainya.
- 9) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam BUMN/D atau lembaga keuangan negara dicatat sebesar jumlah yang dibayar oleh pemerintah daerah untuk penyertaan modal tersebut baik di dalam atau di luar negeri serta pada lembaga-lembaga keuangan dimana pemerintah daerah memiliki kepentingan yang berdasarkan perjanjiannya dinyatakan sebagai penyertaan modal.

10) Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi atau 1 (satu) tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan atau dari sitaan atau rampasan.

Kebijakan penilaian aset tetap telah mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang menyatakan bahwa aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan

- Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap tersebut.
- Kebijakan Penyusutan Aset Tetap telah diterapkan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pangandaran bahwa penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan aset tetap disajikan dalam laporan operasional.
- Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, maka penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.
- Metode penyusutan aset tetap yang dipergunakan adalah Metode Garis Lurus (*straight line method*).

11) Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan baru dapat dicatat sebagai aset daerah pada saat biaya telah dikeluarkan. Konstruksi dalam pengerjaan dinyatakan dalam neraca dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Bila biaya perolehan suatu konstruksi dalam pengerjaan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah aset itu akan ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan. Konstruksi dalam pengerjaan dinilai berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan atas pekerjaan tersebut.

12) Dana Bergulir

Dana Bergulir adalah program berupa bantuan pinjaman penyaluran dana kepada fihak ketiga sesuai dengan program pmda. Pengelolaan dana tersebut diserahkan kepada Tim Teknis/Bank Jabar Cabang Pangandaran. Jumlah yang dicatat di neraca adalah sebesar dana yang telah diserahkan dari Pemda ke Tim Teknis/Bank Jabar.

13) Kewajiban Jangka Pendek

Merupakan utang lancar yang harus dibayar kembali atau akan jatuh tempo dalam satu periode akuntansi atau 12 (dua belas) bulan sejak tanggal neraca.

Dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing (valas) dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi terdiri dari:

- Bagian Lancar (BL) Utang kepada Pemerintah Pusat.

Merupakan Bagian Utang Jangka Panjang kepada Pemerintah Pusat, yang dipindahkan ke Utang Jangka Pendek karena akan jatuh tempo dalam satu periode akuntansi atau 12 (dua belas) bulan sejak tanggal neraca.

➤ Utang Perhitungan Fihak Ketiga.

Merupakan utang jangka pendek kepada fihak ketiga yang akan jatuh tempo dalam periode akuntansi.

➤ Utang Bunga, Denda, dan *Commitment Fee*.

- Utang Bunga adalah beban bunga yang harus dibayar oleh Pemda kepada *Lender* melalui DP3 karena telah menarik pinjaman dengan tarif suku bunga tertentu, dimana pembayarannya telah jatuh tempo.
- Denda adalah kewajiban yang timbul karena Pemda tidak dapat melunasi angsuran pokok utang maupun bunganya dengan prosentase tertentu secara tepat waktu sesuai perjanjian pinjaman yang telah disepakati kedua belah fihak.
- *Commitment Fee* adalah kewajiban yang harus dibayar oleh Pemda sebesar prosentase tertentu terhadap jumlah pinjaman yang belum/tidak ditarik sampai dengan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman.

14) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Kewajiban jangka panjang dapat berasal dari luar negeri maupun dalam negeri.

Kewajiban jangka panjang diakui pada saat dana tersebut diterima dan dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing (valas) di konversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (Kurs Tengah BI) pada tanggal transaksi.

➤ Utang kepada Pemerintah.

Utang jangka panjang kepada pemerintah pusat, untuk tenggang waktu lebih dari satu periode akuntansi.

➤ Utang Bunga Jangka Panjang.

Utang Bunga Jangka Panjang merupakan utang atas bunga pinjaman jangka panjang yang pembayaran bunganya belum jatuh tempo.

15) Ekuitas.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah.

16) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.

17) Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/deficit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya

18) Laporan Arus Kas yang selanjutnya disebut LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

19) Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/koreksi kesalahan dan ekuitas akhir.

20) Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

4.4.1. Kebijakan Akuntansi Anggaran

- 1) Kebijakan akuntansi anggaran bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi anggaran mencakup definisi, pengakuan dan pengukuran/penilaian.
- 2) Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pangandaran meliputi rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diukur dalam satuan mata uang rupiah dan disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.
- 3) Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- 4) Anggaran diakui pada saat ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang berwenang selaku pejabat/pelaksana tugas kepala daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD, serta pada saat anggaran di alokasikan.

4.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

- 1) Kebijakan akuntansi pendapatan bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi pendapatan mencakup definisi, pengakuan, pengukuran/penilaian dan pengungkapan pendapatan.
- 2) Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Pangandaran, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
- 3) Pendapatan diklasifikasikan menurut sumber dan pusat pertanggungjawaban. Sumber Pendapatan dirinci berdasarkan kelompok, jenis dan obyek pendapatan, sedangkan pusat pertanggungjawabannya dirinci berdasarkan bagian atau fungsi dan unit organisasi Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
- 4) Pendapatan mencakup pendapatan asli daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.
- 5) Akuntansi dan pembukuan pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya.
- 6) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan pada periode pendapatan maupun periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan periode berkenaan.
- 7) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- 8) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukan koreksi dan pengembalian tersebut.
- 9) Pendapatan diukur dengan mata uang rupiah pada saat kas diterima. Apabila pendapatan diukur dengan mata uang asing, maka harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada saat terjadi pendapatan.

4.4.3. Kebijakan Akuntansi Belanja

- 1) Kebijakan akuntansi belanja bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi belanja mencakup definisi, pengakuan, pengukuran / penilaian dan pengungkapan belanja.
- 2) Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran atau sebagai penurunan aktiva dan atau kenaikan utang yang digunakan untuk berbagai kegiatan pemerintahan dalam suatu periode akuntansi.

- 3) Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran atau sebagai penurunan aktiva dan atau kenaikan utang yang digunakan untuk berbagai kegiatan pemerintahan dalam suatu periode akuntansi.
- 4) Belanja diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan sebagai urusan wajib dan urusan pilihan, serta menurut fungsi dan pusat pertanggungjawaban. Penggunaan belanja dirinci berdasarkan kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja, sedangkan pusat pertanggungjawabannya dirinci berdasarkan bidang atau fungsi dan unit organisasi Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
- 5) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Daerah, yang menjadi beban daerah dan pada saat SPJ disahkan.
- 6) Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja administrasi umum yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan pada SKPD berkenaan.
- 7) Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan pada SKPD berkenaan.
- 8) Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah
- 9) Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah.
- 10) Belanja barang dan jasa, serta belanja modal diakui pada saat aktiva atau jasa yang dibeli telah diterima dan/atau hak kepemilikannya telah berpindah. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja), yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya dibukukan sebagai penambah ekuitas dana lancar (menambah pendapatan lainnya).
- 11) Belanja diukur dengan menggunakan mata uang rupiah pada saat terjadi pengeluaran kas. Belanja yang diukur dengan mata uang asing harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat terjadinya belanja.

4.4.4. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

- 1) Kebijakan akuntansi pembiayaan bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi pembiayaan meliputi definisi, pengakuan, pengukuran/penilaian dan pengungkapan pembiayaan.
- 2) Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Pangandaran pada satu periode akuntansi.
- 3) Sumber pembiayaan Pemerintah Kabupaten Pangandaran terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- 4) Pembiayaan diakui selama periode berjalan dan akhir periode. Dalam periode berjalan, pembiayaan diakui pada saat kas diterima atau pada saat kas dikeluarkan. Pada akhir periode, pengakuan pembiayaan berdasarkan pada jumlah selisih pendapatan dan belanja yang dialokasikan atau ditutup setelah diperhitungkan dengan elemen-elemen pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan dan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.
- 5) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.
- 6) Pembiayaan diukur menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Pembiayaan yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat terjadinya pembiayaan.

4.4.5. Kebijakan Akuntansi Aset

- 1) Kebijakan akuntansi aset bertujuan mengatur perlakuan akuntansi aset meliputi, definisi, pengakuan, pengukuran/penilaian dan pengungkapan aset.
- 2) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang. Dalam pengertian ini yang dimaksud aset Pemerintah Kabupaten Pangandaran tidak mencakup hutan alam, kekayaan dalam laut, maupun kandungan tambang yang belum diolah oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
- 3) Aset disini mencakup juga aset-aset yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Pangandaran namun belum didukung dengan bukti kepemilikan formal yang sah, termasuk sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Tujuannya untuk menjaga kelengkapan, keamanan, dan kelestarian aset, agar semua aset terdaftar dan terawasi.
- 4) Aset bersejarah tidak harus diungkap dalam neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, nilai perolehan ataupun nilai wajar tidak harus diungkapkan, namun biaya rekonstruksi, pemeliharaan harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran. Suatu aset dapat diakui dan dicatat dalam akuntansi apabila aset tersebut mempunyai manfaat ekonomi masa depan dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- 5) Semua aset yang tercatat dalam neraca harus diukur nilainya dengan satuan uang rupiah, jika terdapat aset yang diperoleh dengan mata uang asing harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia.
- 6) Untuk pertanggungjawaban, aset dinilai dengan menggunakan biaya perolehan, dimana jika biaya perolehan tidak diketahui digunakan penaksiran atau nilai wajar atas biaya perolehan aset yang bersangkutan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- 7) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau suatu konstruksi mencerminkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat siap untuk dipergunakan.
- 8) Aset tidak dicatat dan tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran setelah periode akuntansi berjalan.
- 9) Aset diakui pada saat timbulnya, diterimakan atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.
- 10) Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Pengakuan aset dalam akuntansi terjadi bersamaan dengan perolehan aset yang bersangkutan.
- 11) Aset diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktifitas operasi Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

4.4.6. Kebijakan Akuntansi Pendapatan - LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

- Pendapatan-LO diakui pada saat dapat direalisasi jika kemungkinan besar kas akan diterima oleh pemerintah, dapat diukur secara andal, dan kemungkinan besar potensi ekonomi akan mengalir masuk ke rekening kas umum daerah.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.4.7. Kebijakan Akuntansi Beban - LO

Beban-LO adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.
- Timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
- Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.
- Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban bunga, beban subsidi, beban bantuan sosial, beban transfer, dan beban tak terduga.
- Beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

4.4.8. Kebijakan Akuntansi Surplus/Defisit -LO

Surplus/Defisit-LO adalah selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

4.4.9. Kebijakan Akuntansi Laporan Perubahan Saldo anggaran Lebih

Laporan Perubahan Sado Anggaran Lebih memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercermin pada pendapatan, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.

- Laporan Perubahan Sado Anggaran Lebih menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam mutasi penambahan atau pengurangan saldo anggaran lebih dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
- Laporan Perubahan Sado Anggaran Lebih disusun guna melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga antara Neraca, Laporan Realisasi Anggran, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

4.4.10. Kebijakan Akuntansi Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas memberikan informasi tentang informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dengan tahun sebelumnya yang tercermin pada

ekuitas awal, surplus/defisit laporan operasional, koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas, dan saldo ekuitas akhir dari suatu entitas pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas menyediakan informasi tentang kenaikan atau penurunan ekuitas yang tercerminkan dalam ekuitas awal, surplus/defisit laporan operasional, koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas, dan saldo ekuitas akhir dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas disusun guna melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga antara Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Perubahan Ekuitas mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.



BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. POS-POS BELANJA- LRA

5.1.1. PENDAPATAN

Pendapatan - LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat diterima pada kas di bendahara penerimaan dan rekening kas daerah berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto atau nilai nominal yang tertera pada dokumen bukti penerimaan atau dokumen lainnya yang dipersamakan sesuai dengan posnya masing-masing, dan tidak mencatat jumlah netto nya atau setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran merupakan salah satu SKPD yang tidak menghasilkan atau mengelola Pendapatan, sehingga di Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran tidak terdapat anggaran maupun realisasi Pendapatan pada Tahun Anggaran 2024.

5.2.1. BELANJA

Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas Daerah yang mengurangi ekuitas dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah. Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 S.d Bulan Desember 2024 sebesar Rp. 8.417.570.661,00 atau 84,56% dari anggaran sebesar Rp. 9.954.432.821,00 sedangkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp. 9.453.635.898,00 Realisasi Belanja Daerah terdiri dari beberapa jenis belanja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2 - Anggaran dan Realisasi Belanja s.d Bulan Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi sd Desember 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Operasi	9.954.432.821,00	8.417.570.661,00	84,56	9.402.625.898,00
2	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	51.010.000,00
	Jumlah	9.954.432.821,00	8.417.570.661,00	84,56	9.453.635.898,00

5.2.1.1 BELANJA OPERASI

Belanja operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Realisasi Belanja Operasi TA 2024 s.d Bulan Desember 2024 adalah sebesar Rp. 8.417.570.661,00 atau 84,56% dari anggaran sebesar Rp.9.954.432.821,00 sedangkan realisasi Tahun sebelumnya sebesar Rp.9.402.625.898,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3 - Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi s.d Bulan Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi sd Desember 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Pegawai	2.783.309.000,00	2.526.340.069,00	90,77	2,162,476,888.00
2	Belanja Barang dan Jasa	7.171.123.821,00	5.891.230.592,00	82,15	7,239,649,010.00
3	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Jumlah		9.954.432.821,00	8.417.570.661,00	84,56	Rp9.402.625.898.00

5.2.1.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 adalah sebesar Rp. 2.526.340.069,00 atau 90,77% dari anggaran sebesar Rp2.783.309.000,00 sedangkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp2.162.476.888,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4 - Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai s.d Bulan Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi sd Desember 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.417.308.086,00	1.384.296.579,00	97,67	1,379,924,598.00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.130.940.914,00	959.833.490,00	84,87	672,652,290.00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	235.060.000,00	182.210.000,00	77,52	109,900,000.00
Jumlah		2.783.309.000,00	2.526.340.069,00	90,77	2.162.476.888,00

5.2.1.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 s.d Bulan Desember adalah sebesar Rp5.891.230.592,00 atau 82,15% dari anggaran sebesar Rp7.171.123.821,00.00 sedangkan realisasi Tahun sebelumnya sebesar Rp7.239.649.010,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 - Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa s.d Bulan Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi sd Desember 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Barang	1.830.885.480,00	1.642.362.955,00	89,70	2,119,039,779.00
2	Belanja Jasa	2.394.092.041,00	1.604.642.109,00	67,03	1,921,009,848.00
3	Belanja Pemeliharaan	51.202.500,00	41.708.500,00	81,46	423,379,225.00
4	Belanja Perjalanan Dinas	2.889.693.800,00	2.597.267.028,00	89,88	2,770,970,158.00

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi sd Desember 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.250.000,00	5.250.000,00	100,00	5,250,000.00
	Jumlah	7.171.123.821,00	5.891.230.592,00	82,15	7,239,649,010.00

Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang s.d Bulan Desember 2024 adalah sebesar Rp.1.642.362.955,00 atau 89,70% dari anggaran sebesar Rp.1.830.885.480,00 yang merupakan Belanja Barang Pakai Habis. Sedangkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp. 2.119.039.779,00.

Tabel 6 - Anggaran dan Realisasi Belanja Barang s.d Bulan Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi sd Desember 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	-	-	-	4.910.000,00
2	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	34.547.000,00	32.500.000,00	94,07	17.751.440,00
3	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	-	-	-	3.897.173,00
4	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	10.528.245,00	10.139.200,00	96,30	6.799.077,00
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	50.246.720,00	50.233.230,00	99,97	76.918.682,00
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	203.962.720,00	158.133.560,00	77,53	278.733.300,00
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.700.000,00	1.260.000,00	26,81	2.300.000,00
8	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	-	-	-	2.700.000,00
9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.556.245,00	-	-	2.019.600,00
10	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	-	-	-	38.250.000,00
11	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	62.388.550,00	44.490.965,00	71,31	21.093.527,00
12	Belanja Obat-Obatan-Obat	-	-	-	114.800,00
13	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	291.276.000,00	291.276.000,00	100,00	374.565.760,00
14	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.160.430.000,00	1.048.080.000,00	90,32	1.179.504.500,00
15	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	6.250.000,00	6.250.000,00	100,00	12.500.000,00
16	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	-	-	-	79.481.920,00
17	Belanja Pakaian Adat Daerah	-	-	-	17.500.000,00
	Jumlah	1.830.885.480,00	1.642.362.955,00	89,70	2.119.039.779,00

2. Belanja Jasa

Realisasi Belanja Jasa tahun 2024 adalah sebesar Rp.1.604.642.109,00 atau 67,03% dari anggaran sebesar Rp.2.394.092.041,00 sedangkan realisasi Tahun sebelumnya sebesar Rp.1.921.009.848,00. Rincian Belanja Jasa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7 - Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa s.d Bulan Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi sd Desember 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Jasa Kantor	2.112.760.041,00	1.339.092.109,00	80,64	1.713.525.848,00
2	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	145.282.000,00	129.500.000,00	89,14	136.000.000,00
3	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	137.500.000,00	136.000.000,00	98,91	71.484.000,00
4	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	136.050.000,00	136.050.000,00	100	-
	Jumlah	2.394.092.041,00	1.604.642.109,00	67,03	1.921.009.848,00

3. Belanja Pemeliharaan

Realisasi Belanja Pemeliharaan tahun 2024 adalah sebesar Rp423,379,225.00 atau 57,26% dari anggaran sebesar Rp464,550,000.00 sedangkan realisasi Tahun sebelumnya sebesar Rp423,379,225.00 Rincian Belanja Pemeliharaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8 - Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan s.d Bulan Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi sd Desember 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	31.500.000,00	22.006.000,00	69,86	23,000,000.00
2	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	19.702.500,00	19.702.500,00	100,00	399,379,225.00
3	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	1,000,000.00
	Jumlah	51.202.500,00	41.708.500,00	81,46	423,379,225.00

4. Belanja Perjalanan Dinas

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas tahun 2024 sd Bulan Desember adalah sebesar Rp2.597.267.028.00 atau 89,88% dari anggaran sebesar Rp2.889.693.800,00 sedangkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp2,770,970,158.00. Rincian Belanja Perjalanan Dinas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9 - Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas s.d Bulan Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi sd Desember 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	136.619.800,00	53.109.028,00	38,87	97,578,158.00

2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	28.834.000,00	22.798.000,00	79,07	23,807,000.00
3	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.724.240.000,00	2.521.360.000,00	92,55	2,649,585,000.00
	Jumlah	2.889.693.800,00	2.597.267.028,00	89,88	2,770,970,158.00

5. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2024 sd Bulan Desember adalah sebesar Rp5.250.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp5.250.000,00, sedangkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp5.250.000,00. Rincian Belanja Perjalanan Dinas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10 - Anggaran dan Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat s.d Bulan Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi sd Desember 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	5,250,000.00	5,250,000.00	100.00	5,250,000.00
	Jumlah	5,250,000.00	5,250,000.00	100.00	5,250,000.00

5.2.1.1.3 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 adalah sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00 sedangkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 11 - Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial s.d Bulan Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi sd Desember 2024 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	-	-	-	500,000.00
	Jumlah	-	-	-	500,000.00

5.2.1.2 BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal TA 2024 s.d Bulan Desember adalah sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00, realisasi Tahun 2022 sebesar Rp51,010,000.00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 12 - Anggaran dan Realisasi Belanja Modal s.d Bulan Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi sd Desember 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-	1,764,549,000.00
	Jumlah	-	-	-	1,764,549,000.00

5.2.1.2.1.1 Belanja Modal Peralatan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin TA 2024 s.d Bulan Desember adalah sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00. realisasi Tahun 2023 sebesar Rp51,010,000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 13 - Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin s.d Bulan Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi sd Desember 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	-	-	-	51,010,000.00
2	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	-	-	-
3	Belanja Modal Komputer	-	-	-	-
4	Belanja Modal Alat Peraga	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	51,010,000.00

5.2. NERACA

5.2.1. ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Saldo Aset per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.779.680.052,58 mengalami penurunan sebesar Rp749.482.739,54 atau 21,24% dari saldo Aset tahun sebelumnya sebesar Rp3.529.162.792,12.

Tabel 14 - Saldo Aset s.d Bulan Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	ASET LANCAR	113.479.548,33	175.884.916.87	(62.405.368,54)	(35,48)
2	ASET TETAP	2.567.139.602,37	3.254.216.973,37	(687.077.371.00)	(21.11)
3	ASET LAINNYA	99,060,901.88	99,060,901.88	(0.00)	(0,00)
	Jumlah	2.779.680.052,58	3.529.162.792,12	(749.482.739,54)	(21.24)

5.2.1.1 ASET LANCAR

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp113.479.548,33 mengalami penurunan sebesar Rp62.405.369,00 atau 35,48% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp175.884,916.87. Aset Lancar Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 terdiri dari Persediaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 15 - Saldo Aset Lancar s.d Bulan Desember 2024 dan 2023

No	Aset Lancar	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 20223 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Persediaan	113.479.548,33	175.884.916.87	(62.405.368,54)	(35,48)
	Jumlah	113.479.548,33	175.884.916.87	(62.405.368,54)	(35,48)

5.2.1.1.1 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo persediaan merupakan saldo hasil pemeriksaan fisik persediaan (*stock opname*) per tanggal 31 Desember 2024 dan Tahun 2023 masing-masing sebesar Rp113.479.548,33 dan Rp175.884.916.87 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 16 - Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Alat Tulis Kantor	18.073.624,33	10,562,995.33	7.510.629,00	71,10
2	Bahan Cetak	1,711,510.00	1,711,510.00	0.00	0,00
3	Benda Pos	0.00	400,000.00	(400,000.00)	(100,00)
4	Perabot Kantor	0.00	58,006.00	(58,006.00)	(100,00)
5	Alat Listrik	731.868.00	1,184,568.00	(452,700.00)	(38,22)
6	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.402.501.00	4,145,239.00	(742,738.00)	(17,92)
7	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	89.560.045,00	157,822,598.54	(68.262.553,54)	(43,25)
	Jumlah	113.479.548,33	175,884,916.87	(62.405.368,54)	(35,48)

Saldo persediaan per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp62.405.368,54 atau 35,48% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp175.884.916,87.

5.2.1.2 ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk fasilitas umum/sosial.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 2.567.139.602,37 dan Rp3.254.216.973,37 yang terdiri atas Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya, serta Konstruksi Dalam Pengerjaan. Dari keenam jenis aset tetap tersebut, terdapat 4 jenis aset tetap yang disusutkan yaitu Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Aset Gedung dan Bangunan, Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya. Metode penyusutan yang digunakan yaitu metode garis lurus atau nilai penyusutan diberlakukan sama setiap tahun sampai masa manfaat aset tersebut habis.

Berikut adalah rincian Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023.

Tabel 17 - Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023

Jenis Aset Tetap	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	5.821.203.911,37	5.873.211.911,37	(52.008.000,00)	(0.89)
Gedung dan Bangunan	1.841.892.285,00	1.841.892.285,00	0,00	0,00

Jenis Aset Tetap	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
Aset Tetap Lainnya	1,830,000.00	1,830,000.00	0.00	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan	(5.097.786.594,00)	(4.462.717.223,00)	(635.069.371,00)	(14,23)
Jumlah	2.779.680.052,58	3.529.162.792,12	(749.482.739,54)	(21,24)

Terdapat penurunan Aset Tetap sebesar Rp749.482.739,54 atau turun sebesar 21,24% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp3.529.162.792,12. Kenaikan Aset Tetap tersebut disebabkan mutasi tambah dan mutasi kurang aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 18 - Rincian Mutasi Aset Tetap Tahun 2024 dan 2023

No	Jenis Aset Tetap	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Tanah	-	-	-	0,00
2	Peralatan dan Mesin	5.873.211.911,37	0.00	52.008.000,00	5.821.203.911,37
3	Gedung dan Bangunan	1.841.892.285,00	19.702.500.00	19.702.500.00	1.841.892.285,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	1,830,000.00	-	-	1,830,000.00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
7	Akumulasi Penyusutan	(4.462.717.223,00)	(681.659.871,00)	(46.590.500,00)	(5.097.786.594,00)
	Jumlah	3.529.162.792,12	(661.957.371,00)	25.120.000,00	2.779.680.052,58

5.2.1.2.1 Tanah

Pada Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran tidak memiliki Saldo Tanah per 31 Desember 2024

5.2.1.2.2 Peralatan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5.821.203.911,37 mengalami penurunan sebesar Rp52.008.000,00 atau 0,89% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp5.873.211.911,37.

Tabel 19 - Rincian Mutasi Aset Tetap Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo
		31 Desember 2023 (Rp)			31 Desember 2024 (Rp)
1	Alat Angkutan	3,966,073,848.00	0.00	0.00	3,966,073,848.00
2	Alat Pertanian	52,008,000.00	0.00	52,008,000.00	0.00
3	Alat Kantor dan Rumah Tangga	517.183.464.00	0.00	0.00	517,183,464.00
4	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	241,380,400.00	0.00	0.00	241,380,400.00
5	Alat Kedokteran dan Kesehatan	17.380.000.00	0.00	0.00	17,380,000.00
6	Alat Laboratorium	20,103,000.00	0.00	0.00	20,103,000.00
7	Komputer	1.057.083.199,37	0.00	0.00	1,057,083,199.37
8	Rambu-rambu	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
	Jumlah	5,873,211,911.37	0.00	52,008,000.00	5.821.203.911,37

Penjelasan penambahan dan pengurangan saldo Peralatan dan Mesin Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

I	SALDO AWAL PER 01 JANUARI 2024	5,873,211,911.37
II	MUTASI TAMBAH	0.00
	1. Belanja Modal Tahun 2024 (LRA)	0.00
	JUMLAH MUTASI TAMBAH	0.00
III	MUTASI KURANG	52.008.000.00
	1. Mutasi Ke SKPD Lain/ Dinas	52.008.000.00
	2. Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Barang Extracomtable	0.00
	JUMLAH MUTASI KURANG	52.008.000.00
IV	SALDO PER 31 DESEMBER 2024	5.821.203.911,37

5.2.1.2.4 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.841.892.285.00 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp.1.841.892.285.00.

Tabel 20 - Rincian Mutasi Aset Tetap Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo
		31 Desember 2023 (Rp)			31 Desember 2024 (Rp)
1	Bangunan Gedung	1.841.892.285.00	19.702.500,00	19.702.500,00	1.841.892.285.00
	Jumlah	1.841.892.285.00	19.702.500,00	19.702.500,00	1.841.892.285.00

Penjelasan penambahan dan pengurangan saldo Gedung dan Bangunan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

I	SALDO AWAL	1.841.892.285.00
II	MUTASI TAMBAH	
	1. Belanja Modal Tahun 2024 (LRA)	19.702.500,00
	2. Kapitalisasi Dari Belanja Barang & Jasa ke Aset Tetap	0.00
	3. Kapitalisasi dari belanja Jasa Konsultan Pengawasan	0.00
	4. Reklasifikasi Dari Persediaan Menjadi Aset Tetap	0.00
	JUMLAH MUTASI TAMBAH	19.702.500.00
III	MUTASI KURANG	0,00
	JUMLAH MUTASI KURANG	0,00
IV	SALDO PER 31 DESEMBER 2024	1.841.892.285.00

5.2.1.2.4 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1,830,000.00 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp1,830,000.00.

Tabel 21 - Rincian Mutasi Aset Tetap Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo 31 Desember 2024 (Rp)
1	Aset Tetap Lainnya	1,830,000.00	0.00	0.00	1,830,000.00
	Jumlah	1,830,000.00	0.00	0,00	1,830,000.00

Penjelasan penambahan dan pengurangan saldo Gedung dan Bangunan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

I	SALDO AWAL	1,830,000.00
II	MUTASI TAMBAH	0,00
	JUMLAH MUTASI TAMBAH	0,00
III	MUTASI KURANG	0,00
	JUMLAH MUTASI KURANG	0,00
IV	SALDO PER 31 DESEMBER 2024	1,830,000.00

5.2.1.2.5 Akumulasi Penyusutan

Saldo Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit aset tanpa ada nilai residu. Nilai residu adalah nilai buku suatu aset tetap pada akhir masa manfaatnya. Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat koreksi nilai aset tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka penyusutan atas aset tersebut perlu disesuaikan. Penyesuaian sebagaimana dimaksud meliputi penyesuaian atas nilai yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan.

Metode penyusutan dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Perhitungan Penyusutan berdasarkan pendekatan bulanan, dengan Laporan Penyusutan secara Semesteran.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset tetap per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5.097.786.594,00 yang diterapkan pada 2 jenis aset tetap yaitu Peralatan dan Mesin, dan Gedung dan Bangunan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 22 - Rincian Penyusutan Aset Tetap Tahun 2024

No	Penyusutan	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 (Rp)	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Peralatan dan Mesin	(4.617.203.193,00)	(4.025.806.679,00)	(591.396.514,00)	14,69
2	Gedung dan Bangunan	(480.583.401,00)	(436.910.544,00)	(43.672.857,00)	10,00
	Jumlah	(5.097.786.594,00)	(4.462.717.223,00)	(635.069.371,00)	14,23

5.2.1.3 ASET LAINNYA

Aset Lainnya termasuk dalam kategori Aset Non Lancar lainnya, termasuk didalamnya aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, piutang TGR yang akan diterima lebih dari 12 bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp99,060,901.88 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan dari saldo tahun sebelumnya sebesar dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 23 - Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Aset Lainnya	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Aset Lain-lain	484.157.888,63	529.157.888,63	(45.000.000,00)	(8,50)
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(385.096.986,75)	(430.096.986,75)	45.000.000,00	(10,46)
	Jumlah	99,060,901.88	99,060,901.88	0,00	(0,00)

5.2.1.3.1 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp484.157.888,63 mengalami penurunan sebesar Rp45.000.000.00 atau 8,50% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp529,157,888.63 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 24 - Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Aset Lain-Lain	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Aset Rusak Berat/Usang	484.157.888,63	529,157,888.63	(45.000.000.00)	(8,50)
	Jumlah	484.157.888,63	529,157,888.63	(45.000.000.00)	(8,50)

1. Aset Rusak Berat/ Usang

Aset Lain-lain merupakan aset dengan kondisi rusak berat yang sudah tidak digunakan dalam operasional Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran dan direncanakan untuk dilakukan penghapusan serta aset-aset lain yang sudah tidak tergolong dalam kriteria aset lancar maupun aset tetap.

Tabel 25 - Rincian Mutasi Aset Lain-lain per 31 Desember 2024

No	Aset Rusak Berat	Saldo per 01 Januari 2024 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	438.882.888,63	0,00	45.000.000.00	393.882.888,63
2	Gedung dan Bangunan	90.275.000,00	0,00	0.00	90,275,000.00
	Jumlah	529,157,888.63	0,00	45.000.000.00	484.157.888,63

2. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp385.096.986,75 mengalami penurunan sebesar Rp45.000.000.00 atau 10,46 % dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp430,096,986.75 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 26 - Rincian Mutasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024

No	Aset Rusak Berat	Saldo per 01 Januari 2024 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Akumulasi penyusutan aset lain-lain	(430,096,986.75)	0,00	(45.000.000.00)	(385.096.986,75)
	Jumlah	(430,096,986.75)	0,00	(45.000.000.00)	(385.096.986,75)

5.2.2 KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

5.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.024.592.972.00 mengalami kenaikan sebesar Rp422.525.657,00 atau 70,18 % dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp602,067,315.00. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 27 - Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Utang Belanja	1.024.592.972.00	602,067,315.00	422.525.657,00	70,18
	Jumlah	1.024.592.972.00	602,067,315.00	422.525.657,00	70,18

5.2.2.1.1 Utang Belanja

Utang Belanja adalah biaya-biaya yang sudah terjadi tetapi sampai akhir periode belum dibayar dan belum dicatat dalam akun yang bersangkutan. Oleh karena itu pada akhir periode akuntansi perlu diadakan penyesuaian agar biaya dapat dibebankan pada periode yang bersangkutan.

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.024.592.972.00 mengalami kenaikan sebesar Rp422.525.657,00 atau 70,18 % dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp602,067,315.00. Utang Belanja pada Tahun 2024 terdiri atas Utang Belanja Pegawai dan Utang Belanja Barang dan Jasa. Rincian Utang Belanja per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 28 - Rincian Utang Belanja per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Utang Belanja Pegawai	205.169.381.00	233,206,855.00	(28.037.474,00)	(13,67)
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	819.423.591.00	368,860,460.00	450.563.131,00	54,99
	Jumlah	1.024.592.972,00	233,206,855.00	422.525.657,00	41,32

1. Utang Belanja Pegawai

Saldo Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp205.169.381.00 mengalami penurunan sebesar Rp28.037.474.00 atau 13,67% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp233,206,855.00. Rincian Utang Belanja Pegawai pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 29 - Rincian Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2024

No	Uraian SPM	Penyedia	No SPM	Nilai SPM (Rp)
1	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Bulan Desember 2024	-	00201/SPM-LS/2.08.2.14.0.00.01./11/2024	18187141.00
2	TU Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (DAK Non Fisik)	-	00205/SPM-TU/2.08.2.14.0.00.01./12/2024	4.000.000.00
3	Pembayaran TPP Bulan November 2024 Kinerja Bulan Oktober 2024	-	00211/SPM-LS/2.08.2.14.0.00.01./12/2024	68.019.996,00
4	Pembayaran TPP Bulan November 2024 Kinerja Bulan Oktober 2024	-	00212/SPM-LS/2.08.2.14.0.00.01./12/2024	15.610.000,00
5	Pembayaran TPP Bulan Desember 2024 Kinerja Bulan November 2024	-	00213/SPM-LS/2.08.2.14.0.00.01./1/2024	68.132.244,00
6	Honorarium Penanggung jawab Pengelola Keuangan Bulan November 2024	-	00214/SPM-LS/2.08.2.14.0.00.01./12/2024	15.610.000,00
7	Honorarium Penanggung jawab Pengelola Keuangan Bulan Desember 2024	-	00215/SPM-LS/2.08.2.14.0.00.01./12/2024	15.610.000,00
	Jumlah	-	-	205.169.381.00

2. Utang Belanja Barang dan Jasa

Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp819.423.591,00 mengalami kenaikan sebesar Rp450.563.131,00 atau 122,15 % dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp368.860.460.00. Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa pada Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 30 - Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2024

No	Uraian SPM	Penyedia	No SPM	Nilai SPM (Rp)
1	Ajuan TU Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (KKBPK)(DAK Non Fisik)		00193/SPM-TU/2.08.2.14.0.00.01./B16/2024	84.500.000,00
2	Ajuan TU Kegiatan PENGENDALIAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI DAN SARANA PENUNJANG PELAYANAN KB KE FASILITAS KESEHATAN TERMASUK JARINGAN DAN JEJARINGNYA (DAK Non Fisik)		00194/SPM-TU/2.08.2.14.0.00.01./B16/2024	2.500.000,00
3	Ajuan TU Kegiatan PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM KKBPK DI KAMPUNG KB (DAK Non Fisik)		00195/SPM-TU/2.08.2.14.0.00.01./B16/2024	80.600.000,00
4	Ajuan TU Kegiatan PENGGERAKAN KADER INSTITUSI MASYARAKAT PERDESAAN (IMP) (DAK Non Fisik)		00196/SPM-TU/2.08.2.14.0.00.01./B16/2024	55.800.000,00
5	Ajuan TU Kegiatan Pembinaan Pelayanan KB di Faskes (DAK Non Fisik)		00197/SPM-TU/2.08.2.14.0.00.01./B16/2024	2.550.000,00
6	Ajuan TU Kegiatan PENGELOLAAN KETAHANAN KELUARGA MELALUI PUSAT PELAYANAN KELUARGA SEJAHTERA (PPKS) (DAK Non Fisik)		00198/SPM-TU/2.08.2.14.0.00.01./B16/2024	4.800.000,00

No	Uraian SPM	Penyedia	No SPM	Nilai SPM (Rp)
7	TU Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (DAK Non Fisik)		00204/SPM-TU/2.08.2.14.0.00.01./12/2024	1.700.000,00
8	TU Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (DAK Non Fisik)		00206/SPM-TU/2.08.2.14.0.00.01./12/2024	8.879.510,00
9	TU Kegiatan Pengendalian Program KKBPK (DAK Non Fisik)		00207/SPM-TU/2.08.2.14.0.00.01./12/2024	11.500.000,00
10	TU Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini lokakarya (Minilok) (DAK Non Fisik)		00208/SPM-TU/2.08.2.14.0.00.01./12/2024	18.000.000,00
11	Ajuan TU Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		00209/SPM-TU/2.08.2.14.0.00.01./B16/2024	121.921.000,00
12	Ajuan TU Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang (DAK Non Fisik)		00210/SPM-TU/2.08.2.14.0.00.01./B16/2024	38.600.000,00
13	LS Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota (Honor Non PNS) Bulan April Tahun 2024		00216/SPM-LS/2.08.2.14.0.00.01./1/2024	1.400.000,00
14	LS Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota (Honor Non PNS) Bulan Mei Tahun 2024		00217/SPM-LS/2.08.2.14.0.00.01./1/2024	1.400.000,00
15	LS Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota (Honor Non PNS) Bulan Juni 2024		00218/SPM-LS/2.08.2.14.0.00.01./1/2024	1.400.000,00
16	LS Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Honor Non PNS) Bulan April Tahun 2024		00219/SPM-LS/2.08.2.14.0.00.01./1/2024	3.100.000,00
17	LS Kegiatan Pengendalian Program KKBPK (Honorarium PLKB Non PNS) Bulan April Tahun 2024		00220/SPM-LS/2.08.2.14.0.00.01./1/2024	25.200.000,00
18	LS Kegiatan Pengendalian Program KKBPK (Honorarium PLKB Non PNS) Bulan Mei Tahun 2024		00221/SPM-LS/2.08.2.14.0.00.01./1/2024	19.600.000,00
19	LS Kegiatan Pengendalian Program KKBPK (Honorarium PLKB Non PNS) Bulan Juni Tahun 2024		00222/SPM-LS/2.08.2.14.0.00.01./1/2024	19.600.000,00
20	LS Kegiatan Pengendalian Program KKBPK (Honorarium PLKB Non PNS) Bulan Juli Tahun 2024		00223/SPM-LS/2.08.2.14.0.00.01./1/2024	19.600.000,00
21	LS Kegiatan Pengendalian Program KKBPK (Honorarium PLKB Non PNS) Bulan Agustus Tahun 2024		00224/SPM-LS/2.08.2.14.0.00.01./1/2024	19.600.000,00
22	LS Kegiatan Pengendalian Program KKBPK (Honorarium PLKB Non PNS) Bulan September 2024		00225/SPM-LS/2.08.2.14.0.00.01./1/2024	19.600.000,00
23	LS Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota (Honor Non PNS) Bulan Juli		00226/SPM-LS/2.08.2.14.0.00.01./1/2024	1.400.000,00

No	Uraian SPM	Penyedia	No SPM	Nilai SPM (Rp)
	2024			
24	LS Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota (Honor Non PNS) Bulan Agustus 2024		00227/SPM-LS/2.08.2.14.0.00.01./1/2024	1.400.000,00
25	LS Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota (Honor Non PNS) Bulan September 2024		00228/SPM-LS/2.08.2.14.0.00.01./1/2024	1.400.000,00
26	LS Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi (Honor Non PNS) Bulan April Tahun 2024		00229/SPM-LS/2.08.2.14.0.00.01./1/2024	1.400.000,00
27	LS Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi (Honor Non PNS) Bulan Mei Tahun 2024		00232/SPM-LS/2.08.2.14.0.00.01./1/2024	1.400.000,00
28	LS Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi (Honor Non PNS) Bulan Juni Tahun 2024		00233/SPM-LS/2.08.2.14.0.00.01./1/2024	1.400.000,00
29	LS Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi (Honor Non PNS) Bulan Juli Tahun 2024		00234/SPM-LS/2.08.2.14.0.00.01./1/2024	1.400.000,00
30	LS Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi (Honor Non PNS) Bulan Agustus Tahun 2024		00235/SPM-LS/2.08.2.14.0.00.01./1/2024	1.400.000,00
31	LS Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi (Honor Non PNS) Bulan September Tahun 2024		00236/SPM-LS/2.08.2.14.0.00.01./1/2024	1.400.000,00
32	LS Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Honor Non PNS) Bulan April Tahun 2024		00237/SPM-LS/2.08.2.14.0.00.01./1/2024	1.400.000,00
33	LS Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Honor Non PNS) Bulan Mei Tahun 2024		00238/SPM-LS/2.08.2.14.0.00.01./1/2024	1.400.000,00
34	LS Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Honor Non PNS) Bulan Juni Tahun 2024		00239/SPM-LS/2.08.2.14.0.00.01./1/2024	1.400.000,00
35	LS Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Honor Non PNS) Bulan Juli Tahun 2024		00240/SPM-LS/2.08.2.14.0.00.01./1/2024	1.400.000,00
36	LS Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Honor Non PNS) Bulan Agustus Tahun 2024		00241/SPM-LS/2.08.2.14.0.00.01./1/2024	1.400.000,00
37	LS Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan		00242/SPM-	1.400.000,00

No	Uraian SPM	Penyedia	No SPM	Nilai SPM (Rp)
	Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Honor Non PNS) Bulan September Tahun 2024		LS/2.08.2.14.0.00.01./1/2024	
38	LS Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Honor Non PNS) Bulan Mei Tahun 2024		00243/SPM-LS/2.08.2.14.0.00.01./1/2024	3.100.000,00
39	LS Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Honor Non PNS) Bulan Juni Tahun 2024		00244/SPM-LS/2.08.2.14.0.00.01./1/2024	3.100.000,00
40	LS Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Honor Non PNS) Bulan Juli Tahun 2024		00245/SPM-LS/2.08.2.14.0.00.01./1/2024	3.100.000,00
41	LS Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Honor Non ASN) Bulan Januari Tahun 2024		00246/SPM-LS/2.08.2.14.0.00.01./1/2024	15.000.000,00
42	LS Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Honor Non ASN) Bulan Februari Tahun 2024		00247/SPM-LS/2.08.2.14.0.00.01./1/2024	15.000.000,00
43	LS Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Honor Non ASN) Bulan Maret Tahun 2024		00248/SPM-LS/2.08.2.14.0.00.01./1/2024	15.000.000,00
44	LS Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Honor Non ASN) April Tahun 2024		00249/SPM-LS/2.08.2.14.0.00.01./1/2024	15.000.000,00
45	LS Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Honor Non PNS) Bulan Agustus Tahun 2024		00250/SPM-LS/2.08.2.14.0.00.01./1/2024	3.100.000,00
46	LS Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Honor Non ASN) Bulan Mei Tahun 2024		00251/SPM-LS/2.08.2.14.0.00.01./1/2024	15.000.000,00
47	LS Kegiatan Peningkatan Kepesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (Honor Non PNS) Bulan April Tahun 2024		00251/SPM-LS/2.08.2.14.0.00.01./B16/2024	1.400.000,00
48	LS Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Honor Non ASN) Bulan Juni Tahun 2024		00252/SPM-LS/2.08.2.14.0.00.01./1/2024	15.000.000,00
49	LS Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Honor Non ASN) Bulan Juli Tahun 2024		00253/SPM-LS/2.08.2.14.0.00.01./1/2024	15.000.000,00
50	LS Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Honor Non ASN) Bulan Agustus Tahun 2024		00254/SPM-LS/2.08.2.14.0.00.01./1/2024	15.000.000,00
51	LS Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Honor Non ASN) Bulan September Tahun 2024		00255/SPM-LS/2.08.2.14.0.00.01./1/2024	15.000.000,00
52	LS Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Honor Non		00256/SPM-	3.100.000,00

No	Uraian SPM	Penyedia	No SPM	Nilai SPM (Rp)
	PNS) Bulan September Tahun 2024		LS/2.08.2.14.0.00.01./1/2024	
53	LS Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Honor Non PNS) bulan April Tahun 2024		00257/SPM-LS/2.08.2.14.0.00.01./1/2024	1.700.000,00
54	LS Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Honor Non PNS) bulan Mei Tahun 2024		00258/SPM-LS/2.08.2.14.0.00.01./1/2024	1.700.000,00
55	LS Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Honor Non PNS) bulan Juni Tahun 2024		00259/SPM-LS/2.08.2.14.0.00.01./1/2024	1.700.000,00
56	LS Kegiatan Peningkatan Kepesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (Honor Non PNS) Bulan Mei Tahun 2024		00259/SPM-LS/2.08.2.14.0.00.01./B16/2024	1.400.000,00
57	LS Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Honor Non PNS) bulan Juli Tahun 2024		00260/SPM-LS/2.08.2.14.0.00.01./1/2024	1.700.000,00
58	LS Kegiatan Peningkatan Kepesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (Honor Non PNS) Bulan Juni Tahun 2024		00260/SPM-LS/2.08.2.14.0.00.01./B16/2024	1.400.000,00
59	LS Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Honor Non PNS) bulan Agustus Tahun 2024		00261/SPM-LS/2.08.2.14.0.00.01./1/2024	1.700.000,00
60	LS Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Honor Non PNS) bulan September Tahun 2024		00262/SPM-LS/2.08.2.14.0.00.01./1/2024	1.700.000,00
61	LS Kegiatan Peningkatan Kepesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (Honor Non PNS) Bulan Juli Tahun 2024		00263/SPM-LS/2.08.2.14.0.00.01./B16/2024	1.400.000,00
62	LS Kegiatan Peningkatan Kepesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (Honor Non PNS) Bulan Agustus Tahun 2024		00264/SPM-LS/2.08.2.14.0.00.01./B16/2024	1.400.000,00
63	LS Kegiatan Peningkatan Kepesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (Honor Non PNS) Bulan September Tahun 2024		00265/SPM-LS/2.08.2.14.0.00.01./1/2024	1.400.000,00
64	LS Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Honor Non PNS) bulan April Tahun 2024		00266/SPM-LS/2.08.2.14.0.00.01./1/2024	1.700.000,00
65	LS Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Honor Non PNS) bulan Mei Tahun 2024		00267/SPM-LS/2.08.2.14.0.00.01./1/2024	1.700.000,00
66	LS Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Honor Non PNS) bulan Juni Tahun 2024		00268/SPM-LS/2.08.2.14.0.00.01./1/2024	1.700.000,00
67	LS Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Honor Non PNS) bulan Juli Tahun 2024		00269/SPM-LS/2.08.2.14.0.00.01./1/2024	1.700.000,00
68	LS Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Honor Non PNS) bulan Agustus Tahun 2024		00270/SPM-LS/2.08.2.14.0.00.01./1/2024	1.700.000,00

No	Uraian SPM	Penyedia	No SPM	Nilai SPM (Rp)
69	LS Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Honor Non PNS) bulan September Tahun 2024		00271/SPM-LS/2.08.2.14.0.00.01./1/2024	1.700.000,00
70	LS Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Honor NON PNS) Bulan April Tahun 2024		00272/SPM-LS/2.08.2.14.0.00.01./1/2024	2.800.000,00
71	LS Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Honor NON PNS) Bulan Mei Tahun 2024		00273/SPM-LS/2.08.2.14.0.00.01./1/2024	2.800.000,00
72	LS Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Honor NON PNS) Bulan Juni Tahun 2024		00274/SPM-LS/2.08.2.14.0.00.01./1/2024	2.800.000,00
73	LS Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Honor NON PNS) Bulan Juli Tahun 2024		00275/SPM-LS/2.08.2.14.0.00.01./1/2024	2.800.000,00
74	LS Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Honor NON PNS) Bulan Agustus Tahun 2024		00276/SPM-LS/2.08.2.14.0.00.01./1/2024	2.800.000,00
75	LS Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Honor NON PNS) Bulan September Tahun 2024		00277/SPM-LS/2.08.2.14.0.00.01./1/2024	2.800.000,00
76	LS Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Honor Non PNS) bulan April Tahun 2024		00278/SPM-LS/2.08.2.14.0.00.01./1/2024	1.800.000,00
77	LS Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Honor Non PNS) bulan Mei Tahun 2024		00279/SPM-LS/2.08.2.14.0.00.01./1/2024	7.400.000,00
78	LS Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Honor Non PNS) bulan Juni Tahun 2024		00280/SPM-LS/2.08.2.14.0.00.01./1/2024	7.400.000,00
79	LS Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Honor Non PNS) bulan Juli Tahun 2024		00281/SPM-LS/2.08.2.14.0.00.01./1/2024	7.400.000,00
80	LS Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Honor Non PNS) bulan Agustus Tahun 2024		00282/SPM-LS/2.08.2.14.0.00.01./1/2024	7.400.000,00
81	LS Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Honor Non PNS) bulan September Tahun 2024		00283/SPM-LS/2.08.2.14.0.00.01./1/2024	7.400.000,00
82	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	-	-	55.000,00
83	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	-	-	443.251,00
84	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	-	-	1.174.830,00
	Jumlah			819.423.591,00

5.2.3 EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah. Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.755.087.080,58 mengalami penurunan sebesar Rp1.171.008.396,54 atau 40,04% dari saldo Ekuitas tahun lalu sebesar Rp2.927.095.477,12 yang didapatkan dari perhitungan sebagai berikut:

Tabel 31 - Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Aset	2.779.680.052,58	3.529.162.792,12	(749.482.739,54)	(21,24)
2	Kewajiban	1.024.592.972,00	602.067,315,00	422.525.657,00	70,18
	Ekuitas	1.755.087.080,58	2.927.095.477,12	(1.172.008.396,54)	(40,04)

5.4 LAPORAN OPERASIONAL

Penjelasan akun-akun Laporan Operasional (LO) menguraikan secara singkat mengenai saldo-saldo akun LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 sebagaimana disajikan pada muka laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran.

5.4.1 KEGIATAN OPERASIONAL

5.4.1.1 PENDAPATAN - LO

Pendapatan – LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan Operasional diakui saat timbulnya hak atau saat pendapatan direalisasikan.

Pendapatan - LO pada Tahun 2024 sebesar Rp499.328.655,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.600.582,00 atau 0,52% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp501.929.237,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 32 - Rincian Pendapatan Operasional Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	499.328.655,00	501.929.237,00	(2.600.582,00)	(0,52)
	Pendapatan Hibah	499.328.655,00	501.929.237,00	(2.600.582,00)	(0,52)
	Jumlah	499.328.655,00	501.929.237,00	(2.600.582,00)	(0,52)

5.4.1.1.1 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2023 adalah sebesar Rp499.328.655,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.600.582,00 atau 0,52% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp501.929.237,00. Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2024 terdiri atas Pendapatan Hibah Sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 33 - Rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pendapatan Hibah	499.328.655,00	501.929.237,00	(2.600.582,00)	(0,52)
	Jumlah	499.328.655,00	501.929.237,00	(2.600.582,00)	(0,52)

5.4.1.1.1.1 Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah merupakan hibah aset yang berasal dari Pemerintah Pusat/Kementerian/Provinsi/Pihak ke-3 ke Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran pada tahun 2024 sebesar Rp499.328.655,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.600.582,00 atau 0,52% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp501.929.237,00.

Tabel 34 - Rincian Pendapatan Hibah Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	499.328.655,00	501.929.237,00	(2.600.582,00)	(0,52)
	Jumlah	499.328.655,00	501.929.237,00	(2.600.582,00)	(0,52)

5.4.1.2 BEBAN OPERASI

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban Operasional Tahun 2024 adalah sebesar Rp8.911.696.961,54 mengalami penurunan sebesar Rp628.385.402,87 atau 6,59 % dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp9.540.082.364,41. Beban Operasional Tahun 2024 terdiri atas 3 jenis beban sesuai dengan klasifikasi yang diatur dalam SAP dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 35 - Rincian Beban Operasional Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Pegawai	2.498.302.595,00	2.360.749.237,00	137.553.358,00	5,83
2	Beban Barang/ Persediaan	1.827.565.838,54	2.209.666.266,41	(382.100.427,87)	(17,29)
3	Beban Jasa	1.789.380.500,00	2.133.739.203,00	(344.358.703,00)	(16,14)
4	Beban Pemeliharaan	22.006.000,00	43.702.500,00	(21.696.500,00)	(49,65)
5	Beban Perjalanan Dinas	2.769.192.028,00	2.786.475.158,00	(17.283.130,00)	(0,62)
6	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00
7	Beban Bantuan Sosial	0,00	500.000,00	(500.000,00)	(100,00)
8	Beban Penyusutan dan Amortisasi	681.659.871,00	803.148.625,00	(121.488.754,00)	(15,13)
	Jumlah	8.911.696.961,54	9.540.082.364,41	(628.385.402,87)	(6,59)

5.4.1.2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai tahun 2024 adalah sebesar Rp2.498.302.59,00 mengalami kenaikan sebesar Rp137.553.358,00 atau 5,83% dari beban tahun sebelumnya sebesar Rp2.360.749.237,00. Rincian beban pegawai adalah sebagai berikut:

Tabel 36 - Rincian Beban Pegawai Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.378.154.365,00	1.380.739.447,00	(2.585.082,00)	(0,19)
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	887.108.230,00	881.529.790,00	5.578.440,00	0,63
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	233.040.000,00	98.480.000,00	134.560.000,00	136,64
	Jumlah	2.498.302.595,00	2.360.749.237,00	137.553.358,00	5,83

5.4.1.2.2 Beban Barang/ Persediaan

Beban Barang/ Persediaan tahun 2024 adalah sebesar Rp1.827.565.838,54 mengalami kenaikan sebesar Rp2,209,666,266.41 atau 17,29 % dari beban tahun sebelumnya sebesar Rp382.100.427,87. Rincian beban barang/persediaan adalah sebagai berikut :

Tabel 37 - Rincian Beban Persediaan per Perangkat Daerah Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
	Beban Barang Pakai Habis	1.827.565.838,54	2.209.666.266,41	(382.100.427,87)	(17,29)
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	4.910.000,00	(4.910.000,00)	(100,00)
2	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	33.750.000,00	17.751.440,00	15.998.560,00	90,13
3	Beban Bahan-Bahan Lainnya	0,00	3.897.173,00	(3.897.173,00)	(100,00)
4	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	10.139.200,00	6.799.077,00	3.340.123,00	49,13
5	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	42.722.601,00	90.063.646,34	(47.341.045,34)	(52,56)
6	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	192.153.800,00	280.004.350,00	(87.850.550,00)	(31,37)
7	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.360.000,00	1.900.000,00	(540.000,00)	(28,42)
8	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	58.006,00	2.700.000,00	(2.641.994,00)	(97,85)
9	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	452.700,00	1.161.532,00	(708.832,00)	(61,03)
10	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	0,00	38.250.000,00	(38.250.000,00)	(100,00)
11	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	59.765.703,00	21.506.402,00	38.259.301,00	177,90

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
12	Beban Obat-Obatan-Obat	0,00	114.800,00	(114.800,00)	(100,00)
13	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	368.733.828,54	429.121.426,07	(60.387.597,53)	(14,07)
14	Beban Makanan dan Minuman Rapat	1.112.180.000,00	1.202.004.500,00	(89.824.500,00)	(7,47)
15	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	6.250.000,00	12.500.000,00	(6.250.000,00)	(50,00)
16	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	79.481.920,00	(79.481.920,00)	(100,00)
17	Beban Pakaian Adat Daerah	0,00	17.500.000,00	(17.500.000,00)	(100,00)
	Total	1.827.565.838,54	2.209.666.266,41	(382.100.427,87)	(17,29)

5.4.1.2.3 Beban Jasa

Beban Jasa tahun 2024 adalah sebesar Rp1.789.380.500,00 mengalami penurunan sebesar Rp344.358.703,00 atau 16,14% dari beban jasa tahun sebelumnya sebesar Rp2.133.739.203,00. Rincian beban jasa per Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 38 - Rincian Beban Jasa Tahun 2024 dan 2023

No	Perangkat Daerah	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Jasa Kantor	1.525.330.500,00	2.015.941.703,00	(490.611.203,00)	(24,34)
2	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	18.804.000,00	(18.804.000,00)	(100,00)
3	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	128.000.000,00	137.500.000,00	(9.500.000,00)	(6,91)
4	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	(19.702.500,00)	19.702.500,00	(100,00)
5	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	136.050.000,00	0,00	136.050.000,00	100,00
	Jumlah	1.789.380.500,00	2.133.739.203,00	(344.358.703,00)	(16,14)

5.4.1.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan tahun 2024 adalah sebesar Rp22.006.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp21.696.500,00 atau 49,65 % dari beban pemeliharaan tahun sebelumnya sebesar Rp43.702.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 39 - Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	22.006.000,00	23.000.000,00	(994.000,00)	(4,32)
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	19.702.500,00	(19.702.500,00)	(100,00)
3	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	Jumlah	22.006.000,00	43.702.500,00	(21.696.500,00)	(49,65)

5.4.1.2.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas tahun 2024 adalah sebesar Rp2.769.192.028,00 mengalami kenaikan sebesar Rp17.283.130,00 atau 0,62 % dari tahun sebelumnya sebesar Rp2,786,475,158.00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 40 - Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	53.109.028,00	97.578.158,00	(44.469.130,00)	(45,57)
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	22.193.000,00	26.912.000,00	(4.719.000,00)	(17,53)
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.693.890.000,00	2.661.985.000,00	31.905.000,00	1,20
	Jumlah	2.769.192.028,00	2.786.475.158,00	(17.283.130,00)	(0,62)

5.4.1.2.7 Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2024 adalah sebesar Rp5,250,000.00 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp5,250,000,00.

Tabel 41 - Rincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00

5.4.1.2.8 Beban Bantuan Sosial

Beban bantuan sosial Tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00 sedangkan tahun sebelumnya terdapat beban bantuan sosial sebesar Rp500.000.00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 42 - Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	0.00	500,000.00	(500,000.00)	(100.00)
	Jumlah	0.00	500,000.00	(500,000.00)	(100.00)

5.4.1.2.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2024 adalah sebesar Rp681.659.871,00 mengalami penurunan sebesar Rp121.488.754,00 atau 15,13% dari beban tahun sebelumnya sebesar Rp803.148.625,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 43 - Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	637.987.014,00	767.848.950,00	(129.861.936,00)	(16,91)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	43.672.857,00	35.299.675,00	8.373.182,00	23,72
	Jumlah	681.659.871,00	803.148.625,00	(121.488.754,00)	(15,13)

5.4.2 SURPLUS DEFISIT LO

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional tahun 2024 adalah sebesar Rp9.094.028.177,54 mengalami penurunan sebesar Rp747.273.574,87 atau 7,59% dari tahun sebelumnya sebesar Rp9.841.301.752,41.

Surplus/Defisit-LO Tahun 2024 adalah sebesar Rp9.094.028.177,54 didapatkan dari perhitungan sebagai berikut:

1) Pendapatan – LO	499.328.655,00
2) Beban	9.593.356.832,54
3) Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	-
Surplus/(Defisit)-LO	(9.094.028.177,54)

5.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas, yaitu laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang terdiri atas saldo akhir tahun sebelumnya yang menjadi saldo awal ekuitas, penambahan atau pengurangan surplus/defisit dari operasional tahun berjalan serta dampak akumulatif karena koreksi perubahan kebijakan/kesalahan mendasar. Laporan operasional pada Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional (LO) dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas SKPD Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut :

Tabel 44 - Rincian Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2024 dan 2023

Uraian	2024	2023
EKUITAS AWAL	2,927,095,477.12	2,927,095,477.12
Surplus/Defisit-LO	(9,094,028,177.54)	0.00
RK PPKD	8,417,570,661.00	0.00
RK Mutasi Keluar	(495,550,880.00)	0.00
JUMLAH EKUITAS AKHIR	1,755,087,080.58	2,927,095,477.12



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran, maka susunan organisasi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - 2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2.2 Sub Bagian Program dan Keuangan.
3. Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Penggerakan
4. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:
6. Kelompok Jabatan Fungsional
7. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD)

6.2 Sumber Daya Manusia

a. Jumlah Pegawai per 31 Desember 2024 berdasarkan eselon dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 45 - Rincian Pegawai

No	Jabatan	Eselon	Jumlah
1.	Kepala Dinas	III a	1
2.	Sekretaris	III b	1
3.	Kepala Bidang	III b	2
4.	Kepala Sub. Bagian	IV a	2
5.	Kelompok Jabatan Fungsional	IV a	4
6.	Kepala UPTD	IV a	1
7.	Kepala TU	IV b	0
8.	Penelaah Teknis Kebijakan	-	5
9.	Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	1
Jumlah			18

- b. Data pegawai definitif di DKBP3A Kabupaten Pangandaran per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

Tabel 46 - Rincian Pegawai Definitif

NO	NAMA	PANGKAT/ GOL.	JABATAN
1	2	3	4
1	H. DANI HAMDANI, S.Sos., MM	Pembina Utama Muda, IV/c	Kepala Dinas KBP3A
2	Aa Sukmadi, S.Kep	Pembina, Tk. I IV/b	Sekretaris Dinas KBP3A
3	dr. Aris Rismawan	Pembina, IV/a	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4	Elis Rosita, S.K.M, M.M	Penata Tk 1, III/d	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
5	dr. Yati Nurhayati	Pembina, IV/a	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi Dan Pergerakan
6	Asep Rustandi, AM.Kep	Penata Tk 1, III/d	Kepala UPTD Pengendalian Penduduk, Perlindungan Perempuan dan Anak (P4A) Wilayah I
7	Drs. Nanang, M.Si	Pembina, IV/a	Penata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Ahli Muda
8	Pendi	Penata Muda, III/a	Analisis Kebijakan
9	Ade Muis	Penata Tk.I, III/d	Penata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Ahli Muda
10	Rina Mariana, SST	Penata Muda Tk.1, III/b	Penata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Ahli Muda
11	Winda Sondari, S.Psi	Penata Muda Tk.1, III/b	Kepala Sub Bagian Program Dan Keuangan
12	Asep Rustandi, AM.Kep	Penata Tk 1, III/d	Kepala UPTD Pengendalian Penduduk, Perlindungan Perempuan dan Anak (P4A) Wilayah I
13	Drs. Nanang, M.Si	Pembina, IV/a	Penata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Ahli Muda
14	Suryaman, S.KM	Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
15	Adang Lutfi Setiawan, S.E.	Penata Muda III/a	Penelaah Teknis Kebijakan
16	Entang Abdul Aziz, S.E.	Penata Muda III/a	Penelaah Teknis Kebijakan
17	Enung Khoeriyah, S.Sos	Penata Muda III/a	Penelaah Teknis Kebijakan
18	Anti Agustin, S.Tr.Sos.	Penata Muda III/a	Penelaah Teknis Kebijakan
19	Putri Tri Hutami, S.Psi.	Penata Muda III/a	Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
20	Gunawan, S.Kom	Penata Muda III/a	Penelaah Teknis Kebijakan

Selain pegawai definitif, di Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di bantu oleh 18 orang tenaga kontrak, 8 orang TPD (Tenaga Penggerak Desa), serta 15 Orang Motekar yang telah bergabung dan membantu pelaksanaan tugas di Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak bulan Agustus 2013.



BAB VII

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala SKPD Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024, dengan beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Total realisasi belanja tahun anggaran 2024 sebesar **Rp. 8.417.570.661,00**
2. Total realisasi beban tahun anggaran 2024 sebesar **Rp. 9.593.356.832,54**
3. Nilai aset yang dikuasai SKPD Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran per 31 Desember 2024 sebesar **Rp. 2.779.680.052,58**
4. Nilai Ekuitas yang dimiliki SKPD Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran per 31 Desember 2024 sebesar **Rp. 1.755.087.080,58**

Demikian laporan Keuangan SKPD Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran Berbasis Akrua Tahun Anggaran 2024 ini kami susun, agar dapat dipergunakan oleh semua pihak yang berkepentingan di Pemerintah Kabupaten Pangandaran, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat Republik Indonesia di Jakarta dan dapat memperjelas dalam memahami Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2024.

PPK - DKBP3A
Kabupaten Pangandaran

SURYAMAN, S.KM
NIP. 19800310 200902 1 005

Parigi, 02 Januari 2025

Mengetahui,
Kepala DKBP3A
Kabupaten Pangandaran

H. DANI HAMDANI, S.Sos., MM
NIP. 19650417 199003 1 007

LAMPIRAN

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa					SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU)	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini				
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)		
2.08.2.08.2.101.2.02.0001.5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	15.595.500	14.430.000	1.110.000	15.540.000	-	-	-	-	-	-	15.540.000,00	55.500,00		
2.08.2.08.2.101.2.02.0001.5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	51.530.451	47.652.360	3.693.420	51.345.780	-	-	-	-	-	-	51.345.780,00	184.671,00		
2.08.2.08.2.101.2.02.0001.5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.756.019	3.440.733	317.096	3.757.829	-	-	-	-	-	-	3.757.829,00	(1.810,00		
2.08.2.08.2.101.2.02.0001.5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	12.685	11.638	793	12.431	-	-	-	-	-	-	12.431,00	254,00		
2.08.2.08.2.101.2.02.0001.5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	43.557.458	39.834.790	3.551.657	43.386.447	-	-	-	-	-	-	43.386.447,00	171.011,00		
2.08.2.08.2.101.2.02.0001.5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.080.963	1.903.405	169.438	2.072.843	-	-	-	-	-	-	2.072.843,00	8.120,00		
2.08.2.08.2.101.2.02.0001.5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	6.242.960	5.710.277	508.323	6.218.600	-	-	-	-	-	-	6.218.600,00	24.360,00		
2.08.2.08.2.101.2.02.0001.5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	774.356.000	669.578.000	-	669.578.000	-	-	-	-	-	-	669.578.000,00	104.778.000,00		
2.08.2.08.2.101.2.02.0001.5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	356.584.914	290.255.490	-	290.255.490	-	-	-	-	-	-	290.255.490,00	66.329.424,00		
2.08.2.08.2.101.2.02.0001.5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	175.440.000	131.010.000	-	131.010.000	-	-	-	-	-	-	131.010.000,00	44.430.000,00		
2.08.2.08.2.101.2.02.0001.5.1.01.03.08.0002.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	9.600.000	7.200.000	-	7.200.000	-	-	-	-	-	-	7.200.000,00	2.400.000,00		
2.08.2.08.2.101.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	28.650.000	-	-	-	-	-	-	12.750.000	-	12.750.000	12.750.000,00	15.900.000,00		

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa					SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU)	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini				
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)		
2.08.2.08.2.101 2.02.0003.5.1. 02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.08.2.08.2.101 2.02.0003.5.1. 02.02.01.0039.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	28.650.000	-	-	-	-	-	-	12.750.000	-	12.750.000	12.750.000,00	15.900.000.00		
2.08.2.08.2.101 2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	28.650.000	-	-	-	-	-	-	12.750.000	-	12.750.000	12.750.000,00	15.900.000.00		
2.08.2.08.2.101 2.03.0006.5.1. 02.02.01.0039.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	28.650.000	-	-	-	-	-	-	12.750.000	-	12.750.000	12.750.000,00	15.900.000.00		
2.08.2.08.2.101 2.05.0004.	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawalan	47.400.000	-	-	-	-	-	-	21.000.000	-	21.000.000	21.000.000,00	26.400.000.00		
2.08.2.08.2.101 2.05.0004.5.1. 02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	23.700.000	-	-	-	-	-	-	10.500.000	-	10.500.000	10.500.000,00	13.200.000.00		
2.08.2.08.2.101 2.05.0004.5.1. 02.02.01.0039.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	23.700.000	-	-	-	-	-	-	10.500.000	-	10.500.000	10.500.000,00	13.200.000.00		
2.08.2.08.2.101 2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.556.245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.556.245,00		
2.08.2.08.2.101 2.06.0001.5.1. 02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.556.245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.556.245,00		
2.08.2.08.2.101 2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.997.940	-	-	-	-	-	-	48.984.450	-	48.984.450	48.984.450,00	13.490.00		
2.08.2.08.2.101 2.06.0002.5.1. 02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	48.997.940	-	-	-	-	-	-	48.984.450	-	48.984.450	48.984.450,00	13.490.00		
2.08.2.08.2.101 2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.231.550	-	-	-	-	-	-	2.868.965	-	2.868.965	2.868.965,00	3.362.585,00		

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Baramg & Jasa				SPJ UP/GUTU			Jumlah SPJ (LS+UP/GUTU)	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini				
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)		
2.08.2.08.2.101 2.09.0001.5.1. 02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.500.000	-	-	-	-	-	-	1.265.200	-	1.265.200	1.265.200,00	234.800,00		
2.08.2.08.2.101 2.09.0001.5.1. 02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	11.000.000	-	-	-	-	-	-	9.000.000	-	9.000.000	9.000.000,00	2.000.000,00		
2.08.2.08.2.101 2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.189.800	-	-	-	-	-	-	26.128.800	1.004.800	27.133.600	27.133.600,00	8.056.200,00		
2.08.2.08.2.101 2.09.0002.5.1. 02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	10.001.600	-	-	-	-	-	-	10.000.000	-	10.000.000	10.000.000,00	1.600,00		
2.08.2.08.2.101 2.09.0002.5.1. 02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	4.688.200	-	-	-	-	-	-	4.686.000	-	4.686.000	4.686.000,00	2.200,00		
2.08.2.08.2.101 2.09.0002.5.1. 02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	15.000.000	-	-	-	-	-	-	6.686.800	1.004.800	7.691.600	7.691.600,00	7.308.400,00		
2.08.2.08.2.101 2.09.0002.5.1. 02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	5.500.000	-	-	-	-	-	-	4.756.000	-	4.756.000	4.756.000,00	744.000,00		
2.08.2.08.2.101 2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	-	-	-	-	-	-	8.250.000	-	8.250.000	8.250.000,00	6.750.000,00		
2.08.2.08.2.101 2.09.0006.5.1. 02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.000.000	-	-	-	-	-	-	750.000	-	750.000	750.000,00	2.250.000,00		
2.08.2.08.2.101 2.09.0006.5.1. 02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	12.000.000	-	-	-	-	-	-	7.500.000	-	7.500.000	7.500.000,00	4.500.000,00		

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ - UPI/GUTU				Jumlah SPJ (LS+UPI/GUTU)	Sisa Pagu Anggaran
		s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)		
2.08.2.08.2.102 2.01.0004.5.1. 02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.102 2.01.0004.5.1. 02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.102 2.01.0004.5.1. 02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.102 2.01.0004.5.1. 02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.102 2.01.0004.5.1. 02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.102 2.02.0001.	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	147.937.800	-	-	-	-	-	-	116.934.500	16.623.300	133.557.800	133.557.800,00	14.380.000,00		
2.08.2.08.2.102 2.02.0001.5.1. 02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.890.000	-	-	-	-	-	-	6.890.000	-	-	6.890.000,00	-	-	-
2.08.2.08.2.102 2.02.0001.5.1. 02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.185.000	-	-	-	-	-	-	26.185.000	-	-	26.185.000,00	-	-	-
2.08.2.08.2.102 2.02.0001.5.1. 02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	6.250.000	-	-	-	-	-	-	6.250.000	-	-	6.250.000,00	-	-	-
2.08.2.08.2.102 2.02.0001.5.1. 02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	17.350.000	-	-	-	-	-	-	17.350.000	-	-	17.350.000,00	-	-	-
2.08.2.08.2.102 2.02.0001.5.1. 02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	23.950.000	-	-	-	-	-	-	10.750.000	-	-	10.750.000,00	13.200.000,00		

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ - UP/GUTU				Jumlah SPJ (LS+UP/GUT U)	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)			
2.08.2.08.2.102.2.02.0001.5.1.02.02.01.0047.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	13.500.000	-	-	-	-	-	-	13.500.000	-	13.500.000	13.500.000,00	-	-	-	-
2.08.2.08.2.102.2.02.0001.5.1.02.02.05.0001.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	4.000.000	-	-	-	-	-	-	4.000.000	-	4.000.000	4.000.000,00	-	-	-	-
2.08.2.08.2.102.2.02.0001.5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27.862.800	-	-	-	-	-	-	10.059.500	16.623.300	26.682.800	26.682.800,00	-	-	1.180.000,00	-
2.08.2.08.2.102.2.02.0001.5.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	16.700.000	-	-	-	-	-	-	16.700.000	-	16.700.000	16.700.000,00	-	-	-	-
2.08.2.08.2.102.2.02.0001.5.1.02.05.01.0002.	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	5.250.000	-	-	-	-	-	-	5.250.000	-	5.250.000	5.250.000,00	-	-	-	-
2.08.2.08.2.102.2.02.0002.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	21.499.920	-	-	-	-	-	-	21.499.920	-	21.499.920	21.499.920,00	-	-	-	-
2.08.2.08.2.102.2.02.0002.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	499.920	-	-	-	-	-	-	499.920	-	499.920	499.920,00	-	-	-	-
2.08.2.08.2.102.2.02.0002.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.200.000	-	-	-	-	-	-	7.200.000	-	7.200.000	7.200.000,00	-	-	-	-
2.08.2.08.2.102.2.02.0002.5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.600.000	-	-	-	-	-	-	1.600.000	-	1.600.000	1.600.000,00	-	-	-	-
2.08.2.08.2.102.2.02.0002.5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	6.300.000	-	-	-	-	-	-	6.300.000	-	6.300.000	6.300.000,00	-	-	-	-
2.08.2.08.2.102.2.02.0002.5.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5.900.000	-	-	-	-	-	-	5.900.000	-	5.900.000	5.900.000,00	-	-	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU)	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)		
2.08.2.08.2.103	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	21.290.380	-	-	-	-	-	-	12.211.380	-	12.211.380	12.211.380,00	9.079.000,00		
2.08.2.08.2.103 2.01.0001.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	7.856.380	-	-	-	-	-	-	6.356.380	-	6.356.380	6.356.380,00	1.500.000,00		
2.08.2.08.2.103 2.01.0001.5.1. 02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.248.780	-	-	-	-	-	-	1.248.780	-	1.248.780	1.248.780,00	-		
2.08.2.08.2.103 2.01.0001.5.1. 02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	267.600	-	-	-	-	-	-	267.600	-	267.600	267.600,00	-		
2.08.2.08.2.103 2.01.0001.5.1. 02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000	-	-	-	-	-	-	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000,00	-		
2.08.2.08.2.103 2.01.0001.5.1. 02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	900.000	-	-	-	-	-	-	900.000	-	900.000	900.000,00	-		
2.08.2.08.2.103 2.01.0001.5.1. 02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000,00		
2.08.2.08.2.103 2.01.0001.5.1. 02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	940.000	-	-	-	-	-	-	940.000	-	940.000	940.000,00	-		
2.08.2.08.2.103 2.02.0002.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	13.434.000	-	-	-	-	-	-	5.855.000	-	5.855.000	5.855.000,00	7.579.000,00		

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UPI/GUTU			Jumlah SPJ (LS+UPI/GUTU)	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
2.08.2.08.2.103 2.02.0002.5.1. 01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.010.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.010.000,00
2.08.2.08.2.103 2.02.0002.5.1. 02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000	-	-	-	-	-	-	4.000.000	-	4.000.000	4.000.000,00	-
2.08.2.08.2.103 2.02.0002.5.1. 02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.135.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.135.000,00
2.08.2.08.2.103 2.02.0002.5.1. 02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.289.000	-	-	-	-	-	-	1.855.000	-	1.855.000	1.855.000,00	2.434.000,00
2.08.2.08.2.104	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	280.183.600	-	-	-	-	-	-	100.183.600	-	100.183.600	100.183.600,00	180.000.000,00
2.08.2.08.2.104 2.01.0001.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10.183.600	-	-	-	-	-	-	10.183.600	-	10.183.600	10.183.600,00	-
2.08.2.08.2.104 2.01.0001.5.1. 02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	433.600	-	-	-	-	-	-	433.600	-	433.600	433.600,00	-
2.08.2.08.2.104 2.01.0001.5.1. 02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000	-	-	-	-	-	-	1.800.000	-	1.800.000	1.800.000,00	-
2.08.2.08.2.104 2.01.0001.5.1. 02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.950.000	-	-	-	-	-	-	2.950.000	-	2.950.000	2.950.000,00	-
2.08.2.08.2.104 2.01.0001.5.1. 02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.500.000	-	-	-	-	-	-	1.500.000	-	1.500.000	1.500.000,00	-
2.08.2.08.2.104 2.01.0001.5.1. 02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.500.000	-	-	-	-	-	-	3.500.000	-	3.500.000	3.500.000,00	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Baramg & Jasa				SPJ - UP/GU/TU				Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU)	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)			
2.14.2.08.2.102.2.02.0013.	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	120.000.000	-	-	-	-	-	-	97.343.469	-	97.343.469	97.343.469,00	22.656.531,00			
2.14.2.08.2.102.2.02.0013.5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/V Berlangganan	60.000.000	-	-	-	-	-	-	42.343.469	-	42.343.469	42.343.469,00	17.656.531,00			
2.14.2.08.2.102.2.02.0013.5.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	60.000.000	-	-	-	-	-	-	55.000.000	-	55.000.000	55.000.000,00	5.000.000,00			
2.14.2.08.2.103.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.098.654.700	-	-	-	19.702.500	-	19.702.500	2.360.338.200	39.120.000	2.399.458.200	2.419.160.700,00	679.494.000,00			
2.14.2.08.2.103.2.01.0008.	Pengendalian Program KBPK	503.000.000	-	-	-	-	-	-	252.100.000	-	252.100.000	252.100.000,00	250.900.000,00			
2.14.2.08.2.103.2.01.0008.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.000.000	-	-	-	-	-	-	16.500.000	-	16.500.000	16.500.000,00	2.500.000,00			
2.14.2.08.2.103.2.01.0008.5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	24.000.000	-	-	-	-	-	-	20.000.000	-	20.000.000	20.000.000,00	4.000.000,00			
2.14.2.08.2.103.2.01.0008.5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	423.000.000	-	-	-	-	-	-	183.600.000	-	183.600.000	183.600.000,00	239.400.000,00			
2.14.2.08.2.103.2.01.0008.5.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	37.000.000	-	-	-	-	-	-	32.000.000	-	32.000.000	32.000.000,00	5.000.000,00			
2.14.2.08.2.103.2.01.0010.	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	338.289.700	-	-	-	19.702.500	-	19.702.500	234.087.200	-	234.087.200	253.789.700,00	84.500.000,00			
2.14.2.08.2.103.2.01.0010.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.687.200	-	-	-	-	-	-	1.687.200	-	1.687.200	1.687.200,00	-			
2.14.2.08.2.103.2.01.0010.5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	300.000	-	-	-	-	-	-	300.000	-	300.000	300.000,00	-			

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Baramg & Jasa				SPJ UPI/GU/TU				Jumlah SPJ (LS+UPI/GU/TU)	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)			
2.14.2.08.2.103.2.01.0010.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	71.600.000	-	-	-	-	-	-	50.600.000	-	50.600.000	50.600.000,00	21.000.000,00			
2.14.2.08.2.103.2.01.0010.5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	60.000.000	-	-	-	-	-	-	42.000.000	-	42.000.000	42.000.000,00	18.000.000,00			
2.14.2.08.2.103.2.01.0010.5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	50.000.000	-	-	-	-	-	-	40.000.000	-	40.000.000	40.000.000,00	10.000.000,00			
2.14.2.08.2.103.2.01.0010.5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	50.000.000	-	-	-	-	-	-	40.000.000	-	40.000.000	40.000.000,00	10.000.000,00			
2.14.2.08.2.103.2.01.0010.5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	15.000.000	-	-	-	-	-	-	10.500.000	-	10.500.000	10.500.000,00	4.500.000,00			
2.14.2.08.2.103.2.01.0010.5.1.02.02.01.0061.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	19.702.500	-	-	-	19.702.500	-	19.702.500	-	-	-	19.702.500,00	-			
2.14.2.08.2.103.2.01.0010.5.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	70.000.000	-	-	-	-	-	-	49.000.000	-	49.000.000	49.000.000,00	21.000.000,00			
2.14.2.08.2.103.2.01.0011.5.1.02.01.01.0026.	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	158.724.000	-	-	-	-	-	-	139.000.000	-	139.000.000	139.000.000,00	19.724.000,00			
2.14.2.08.2.103.2.01.0011.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	224.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224.000,00			
2.14.2.08.2.103.2.01.0011.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	63.500.000	-	-	-	-	-	-	56.000.000	-	56.000.000	56.000.000,00	7.500.000,00			

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ - UP/GU/TU				Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU)	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)			
2.14.2.08.2.103 2.01.0011.5.1. 02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	31.500.000	-	-	-	-	-	-	27.000.000	-	27.000.000	27.000.000.00	4.500.000.00			
2.14.2.08.2.103 2.01.0011.5.1. 02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	63.500.000	-	-	-	-	-	-	56.000.000	-	56.000.000	56.000.000.00	7.500.000.00			
2.14.2.08.2.103 2.01.0012.	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	100.000.000	-	-	-	-	-	-	61.400.000	-	61.400.000	61.400.000.00	38.600.000.00			
2.14.2.08.2.103 2.01.0012.5.1. 02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.750.000	-	-	-	-	-	-	7.500.000	-	7.500.000	7.500.000.00	1.250.000.00			
2.14.2.08.2.103 2.01.0012.5.1. 02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	81.250.000	-	-	-	-	-	-	43.900.000	-	43.900.000	43.900.000.00	37.350.000.00			
2.14.2.08.2.103 2.01.0012.5.1. 02.02.01.0025.	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	5.000.000	-	-	-	-	-	-	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000.00	-			
2.14.2.08.2.103 2.01.0012.5.1. 02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	5.000.000	-	-	-	-	-	-	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000.00	-			
2.14.2.08.2.103 2.01.0014.	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	200.000.000	-	-	-	-	-	-	160.880.000	39.120.000	200.000.000	200.000.000.00	-			
2.14.2.08.2.103 2.01.0014.5.1. 02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	64.400.000	-	-	-	-	-	-	51.680.000	12.720.000	64.400.000	64.400.000.00	-			
2.14.2.08.2.103 2.01.0014.5.1. 02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.000.000	-	-	-	-	-	-	8.200.000	1.800.000	10.000.000	10.000.000.00	-			

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Baramg & Jasa				SPJ - UPI/GUTU				Jumlah SPJ (LS+UPI/GUTU)	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)			
2.14.2.08.2.103.2.01.0014.5.1.02.02.05.0043.	Belanja Sewa Hotel	1.000.000	-	-	-	-	-	-	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000,00	-	-	-	-
2.14.2.08.2.103.2.01.0014.5.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	124.600.000	-	-	-	-	-	-	100.000.000	24.600.000	124.600.000	124.600.000,00	-	-	-	-
2.14.2.08.2.103.2.02.0004.	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	279.000.000	-	-	-	-	-	-	223.200.000	-	223.200.000	223.200.000,00	55.800.000,00			
2.14.2.08.2.103.2.02.0004.5.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	279.000.000	-	-	-	-	-	-	223.200.000	-	223.200.000	223.200.000,00	55.800.000,00			
2.14.2.08.2.103.2.03.0001.	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarinya	8.500.000	-	-	-	-	-	-	5.754.000	-	5.754.000	5.754.000,00	2.746.000,00			
2.14.2.08.2.103.2.03.0001.5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.500.000	-	-	-	-	-	-	5.754.000	-	5.754.000	5.754.000,00	2.746.000,00			
2.14.2.08.2.103.2.03.0003.	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.006.191.000	-	-	-	-	-	-	862.167.000	-	862.167.000	862.167.000,00	144.024.000,00			
2.14.2.08.2.103.2.03.0003.5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.14.2.08.2.103.2.03.0003.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.14.2.08.2.103.2.03.0003.5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	56.157.000	-	-	-	-	-	-	41.622.000	-	41.622.000	41.622.000,00	14.535.000,00			

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Baramg & Jasa				SPJ UP/GU/TU				Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU)	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)			
2.14.2.08.2.103 2.03.0003.5.1. 02.01.01.0037.	Belanja Obat-Obatan-Obat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.14.2.08.2.103 2.03.0003.5.1. 02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	81.350.000	-	-	-	-	-	-	57.200.000	-	57.200.000	57.200.000.00	24.150.000.00			
2.14.2.08.2.103 2.03.0003.5.1. 02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.14.2.08.2.103 2.03.0003.5.1. 02.02.01.0033.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	608.544.000	-	-	-	-	-	-	559.335.000	-	559.335.000	559.335.000.00	49.209.000.00			
2.14.2.08.2.103 2.03.0003.5.1. 02.02.01.0014.	Belanja Jasa Tenaga Suplr	23.700.000	-	-	-	-	-	-	10.500.000	-	10.500.000	10.500.000.00	13.200.000.00			
2.14.2.08.2.103 2.03.0003.5.1. 02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.14.2.08.2.103 2.03.0003.5.1. 02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.14.2.08.2.103 2.03.0003.5.1. 02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.14.2.08.2.103 2.03.0003.5.1. 02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	236.440.000	-	-	-	-	-	-	193.510.000	-	193.510.000	193.510.000.00	42.930.000.00			
2.14.2.08.2.103 2.03.0008.	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12.700.000	-	-	-	-	-	-	10.100.000	-	10.100.000	10.100.000.00	2.600.000.00			
2.14.2.08.2.103 2.03.0008.5.1. 02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.250.000	-	-	-	-	-	-	3.400.000	-	3.400.000	3.400.000.00	850.000.00			

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Baramg & Jasa				SPJ UP/GU/TU				Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU)	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)			
2.14.2.08.2.104 2.01.0008.	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	52.888.000	-	-	-	-	-	-	31.307.000	-	31.307.000	31.307.000,00	21.582.000,00			
2.14.2.08.2.104 2.01.0008.5.1. 02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	793.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	793.000,00			
2.14.2.08.2.104 2.01.0008.5.1. 02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	112.000	-	-	-	-	-	-	112.000	-	112.000	112.000,00	-			
2.14.2.08.2.104 2.01.0008.5.1. 02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.495.000	-	-	-	-	-	-	4.495.000	-	4.495.000	4.495.000,00	-			
2.14.2.08.2.104 2.01.0008.5.1. 02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.600.000	-	-	-	-	-	-	4.600.000	-	4.600.000	4.600.000,00	-			
2.14.2.08.2.104 2.01.0008.5.1. 02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.14.2.08.2.104 2.01.0008.5.1. 02.02.05.0043.	Belanja Sewa Hotel	10.032.000	-	-	-	-	-	-	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000,00	-			
2.14.2.08.2.104 2.01.0008.5.1. 02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.857.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.14.2.08.2.104 2.01.0008.5.1. 02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	23.000.000	-	-	-	-	-	-	19.100.000	-	19.100.000	19.100.000,00	3.900.000,00			

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Baramg & Jasa				SPJ UP/GU/TU				Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU)	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)			
2.14.2.08.2.104.2.02.0003.	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	13.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.000.000,00	
2.14.2.08.2.104.2.02.0003.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.500.000,00	
2.14.2.08.2.104.2.02.0003.5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000.000,00	
2.14.2.08.2.104.2.02.0003.5.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.500.000,00	
2.14.2.08.2.104.2.02.0005.	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	981.000.000	-	-	-	-	-	-	784.800.000	196.200.000	981.000.000	981.000.000,00	-	-		
2.14.2.08.2.104.2.02.0005.5.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	981.000.000	-	-	-	-	-	-	784.800.000	196.200.000	981.000.000	981.000.000,00	-	-		

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Baramg & Jasa				SPJ UP/GU/TU				Jumlah SPJ (LS-UP/GU/TU)	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan ini		
	JUMLAH	9.954.432.821,00	2.403.495.067,00	78.845.002,00	2.482.340.069,00	430.978.500,00	-	430.978.500,00	430.978.500,00	5.117.170.553,00	387.081.539,00	5.504.252.092,00	8.417.570.661,00	1.536.862.160,00		
	Penerimaan															
	- SP2D															
	- Potongan Pajak															
	a. PPN		-	-	-	42.709.581,00	-	42.709.581,00	35.917.119,00	-	-	35.917.119,00	78.626.700,00			
	b. PPh-21		103.870.309,00	317.096,00	104.187.405,00	14.422.500,00	-	14.422.500,00	171.326.300,00	20.441.000,00	191.767.300,00	310.377.205,00				
	c. PPh-22		-	-	-	3.936.162,00	-	3.936.162,00	4.270.475,00	-	-	4.270.475,00	8.206.637,00			
	d. PPh-23		-	-	-	-	-	-	21.261.684,00	533.400,00	21.795.084,00	21.795.084,00				
	e. PPh-Final		-	-	-	11.432.061,00	-	11.432.061,00	-	-	-	-	11.432.061,00			
	f. Pajak Daerah								102.766.000,00	2.667.000,00	105.433.000,00	105.433.000,00				
	- Lain-lain								-	-	-	-	-			
	Jumlah Penerimaan :		2.507.365.376,00	79.162.098,00	2.586.527.474,00	503.478.804,00	-	503.478.804,00	5.807.566.001,00	67.976.400,00	5.875.542.401,00	8.965.548.679,00				
	Pengeluaran :															
	- SPJ(LS-UP/GU/TU)															
	- Penyeloran Pajak															
	a. PPN		-	-	-	42.709.581,00	-	42.709.581,00	35.917.119,00	-	-	35.917.119,00	78.626.700,00			
	b. PPh-21		103.870.309,00	317.096,00	104.187.405,00	14.422.500,00	-	14.422.500,00	171.326.300,00	20.441.000,00	191.767.300,00	310.377.205,00				
	c. PPh-22		-	-	-	3.936.162,00	-	3.936.162,00	4.270.475,00	-	-	4.270.475,00	8.206.637,00			
	d. PPh-23		-	-	-	-	-	-	21.261.684,00	533.400,00	21.795.084,00	21.795.084,00				
	e. PPh-Final		-	-	-	11.432.061,00	-	11.432.061,00	-	-	-	-	11.432.061,00			
	f. Pajak Daerah								102.766.000,00	2.667.000,00	105.433.000,00	105.433.000,00				
	- Lain-lain		-	-	-	-	-	-	12.016.000,00	91.331,00	12.107.331,00	12.107.331,00				
	Jumlah Pengeluaran :		2.507.365.376,00	79.162.098,00	2.586.527.474,00	503.478.804,00	-	503.478.804,00	5.464.728.131,00	410.814.270,00	5.875.542.401,00	8.965.548.679,00				
	Saldo Kas		-	-	-	-	-	-	342.837.870,00	(342.837.870,00)	-	-	-			



Parti. 31 Desember 2024
Bendahara Pengeluaran



ENTANG ABDUL AZIZ, S.E.
NIP. 19940629 202203 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN

SKPD : 2.08.2.14.0.00.01. DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PE

1-3

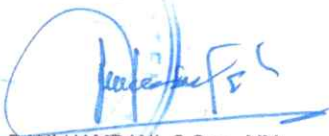
No. BK	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekeni	PENERIMAAN	PENGELUARA	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
5644/SP2	02 Desember 2024	5644/SP2D-LS/DK BP3A/2024	Saldo Awal Bulan Desember				-
			Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LS		78.845.002,00	-	78.845.002,00
			Belanja Gaji Pokok PNS	5.1.01.01.01	-	52.413.659,00	26.431.343,00
			Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5.1.01.01.02	-	7.075.616,00	19.355.727,00
			Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.1.01.01.03	-	10.005.000,00	9.350.727,00
			Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.1.01.01.05	-	1.110.000,00	8.240.727,00
			Belanja Tunjangan Beras PNS	5.1.01.01.06	-	3.693.420,00	4.547.307,00
			Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.1.01.01.07	-	317.096,00	4.230.211,00
			Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.1.01.01.08	-	793,00	4.229.418,00
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	5.1.01.01.09	-	3.551.657,00	677.761,00
			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.1.01.01.10	-	169.438,00	508.323,00
			Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	5.1.01.01.11.	-	508.323,00	-
			Penerimaan Pajak Belanja LS: IWP 1%	IWP 1%	887.914,00	-	887.914,00
			Penerimaan Pajak Belanja LS: IWP 8%	IWP 8%	6.214.115,00	-	7.102.029,00
			Penerimaan Pajak Belanja LS: JKK 0.24%	JKK 0.24%	169.438,00	-	7.271.467,00
			Penerimaan Pajak Belanja LS: JKM 0.72%	JKM 0.72%	508.323,00	-	7.779.790,00
			Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak Penghasilan 21	Pajak Pengh	317.096,00	-	8.096.886,00
			Penerimaan Pajak Belanja LS: PFK 1%	PFK 1%	3.551.657,00	-	11.648.543,00
			Pengeluaran Pajak Belanja LS: IWP 1%	IWP 1%	-	887.914,00	10.760.629,00
			Pengeluaran Pajak Belanja LS: IWP 8%	IWP 8%	-	6.214.115,00	4.546.514,00
			Pengeluaran Pajak Belanja LS: JKK 0.24%	JKK 0.24%	-	169.438,00	4.377.076,00
			Pengeluaran Pajak Belanja LS: JKM 0.72%	JKM 0.72%	-	508.323,00	3.868.753,00
			Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak Penghasilan 21	Pajak Pengh	-	317.096,00	3.551.657,00
			Pengeluaran Pajak Belanja LS: PFK 1%	PFK 1%	-	3.551.657,00	-
5718/SP2	06 Desember 2024	5718/SP2D-GU/DK BP3A/2024	Ganti Uang (GU) Bulan Desember		5.215.000,00	-	5.215.000,00
00021/TB	11 Desember 2024	00021/TBP/2.08.2. 14.0.00.01./B03/20 24	Pelimpahan Uang ke BPPPelimpahan GU 11 dari BP ke BPP Sekretariat		-	4.135.439,00	1.079.561,00
00022/TB	13 Desember 2024	00022/TBP/2.08.2. 14.0.00.01./B03/20 24	Pelimpahan Uang ke BPPPelimpahan GU 11 dari BP ke BPP Sekretariat		-	1.004.800,00	74.761,00

No. BK	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekeni	PENERIMAAN	PENGELUARA	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
00023/TB	17 Desember 2024	00023/TBP/2.08.2. 14.0.00.01./B15/20 24	Pengembalian Uang dari BPP		16.623.300,00	-	16.698.061,00
00031/BP	18 Desember 2024	00031/BPK/2.08.2. 14.0.00.01./B03/20 24	SPPD Perjalanan Dinas Kegiatan Peringatan HUT DWP ke 25 Tk Provinsi Jawa Barat di Bandung Penerima : Mintarsih	5.1.02.04.01	-	2.200.000,00	14.498.061,00
00027/BP	18 Desember 2024	00027/BPK/2.08.2. 14.0.00.01./B03/20 24	SPPD Perjalanan Dinas Kegiatan Peringatan HUT DWP ke 25 Tk Provinsi Jawa Barat di Bandung Penerima : Fuji	5.1.02.04.01	-	2.200.000,00	12.298.061,00
00028/BP	20 Desember 2024	00028/BPK/2.08.2. 14.0.00.01./B03/20 24	SPPD Perjalanan Dinas Kegiatan Peringatan HUT DWP ke 25 Tk Provinsi Jawa Barat di Bandung Penerima : VINA	5.1.02.04.01	-	2.200.000,00	10.098.061,00
00029/BP	20 Desember 2024	00029/BPK/2.08.2. 14.0.00.01./B03/20 24	SPPD Perjalanan Dinas Kegiatan Peringatan HUT DWP ke 25 Tk Provinsi Jawa Barat di Bandung Penerima : TINI SURTINI	5.1.02.04.01	-	2.200.000,00	7.898.061,00
00030/BP	20 Desember 2024	00030/BPK/2.08.2. 14.0.00.01./B03/20 24	SPPD Perjalanan Dinas Kegiatan Peringatan HUT DWP ke 25 Tk Provinsi Jawa Barat di Bandung Penerima : LINA	5.1.02.04.01	-	2.200.000,00	5.698.061,00
00032/BP	20 Desember 2024	00032/BPK/2.08.2. 14.0.00.01./B03/20 24	BBM Kegiatan Peringatan HUT DWP ke 25 Tk Provinsi Jawa Barat di Bandung Penerima : TINI SURTINI	5.1.02.04.01	-	1.063.300,00	4.634.761,00
00033/BP	20 Desember 2024	00033/BPK/2.08.2. 14.0.00.01./B03/20 24	Penginapan Kegiatan Peringatan HUT DWP ke 25 Tk Provinsi Jawa Barat di Bandung Penerima : TINI SURTINI	5.1.02.04.01	-	4.560.000,00	74.761,00
00025/TB	27 Desember 2024	00025/TBP/2.08.2. 14.0.00.01./B04/20 24	Pengembalian Uang dari BPP		16.570,00	-	91.331,00
001/SISA-	30 Desember 2024	001/SISA-UP/DKB P3A/2024	Pengembalian UP Setoran Sisa UP DKBP3A		-	91.331,00	-

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. -

terdiri dari :

- a. Tunai -
- b. Saldo Bank -
- c. Surat Berharga
- d. Pajak Belum Disetor -

Mengetahui
Pengguna Anggaran

H. DANI HAMDANI, S.Sos., MM
NIP. 196504171990031013

Parigi, 31 Desember 2024

Bendahara Pengeluaran


ENTANG ABDUL AZIZ, S.E.
Nip. 19940629 202203 1 007

DATA SETORAN KONTRA POS
PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2024

2.08.2.14.0.00.01. DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1-1

Tanggal	Kode Rekening	Jumlah	Rincian (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5
27 Agustus 2024	5.1.02.04.01.0004.	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK <i>Setoran sisa TU Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)</i> Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.900.000,00	3.900.000,00
9 Oktober 2024	5.1.02.04.01.0003.	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK <i>Pengembalian TU Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	856.000,00	856.000,00
9 Oktober 2024		DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK <i>Setoran Sisa UP DKB3A 2024</i>	1.564.000,00	1.564.000,00
9 Oktober 2024	5.1.02.04.01.0003.	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK <i>DKBP3A Pengembalian TU Sub Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat kontrasepsi dan Sarana Penunjang pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Belanja Perjalanan Dinas Dalam kota)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	246.000,00	246.000,00
31 Oktober 2024	5.1.02.01.01.0052.	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK <i>Pengembalian Sisa TU Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kntrasepsi Jangka Panjang TU IV (DAK Non Fisik)</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.450.000,00	5.450.000,00
30 Desember 2024		DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK <i>Setoran Sisa UP DKB3A</i>	91.331,00	91.331,00
TOTAL				12.107.331,00

Pangandaran, 31 Desember 2024

Mengetahui,
Pengguna Anggaran



H. DANI HAMDANI, S.Sos., MM
Nip. 196504171990031013



Account Activity

Period 01 Dec 2024 - 31 Dec 2024 Alamat JLN STASIUN DESA
Corporate DINAS DKBP3A KABUPATEN PANGANDARAN DS PARIGI KEC PARIGI
Account 0075324200001 - DINAS DKBP3A KABUPATEN KABUPATEN PANGANDARAN
Product Giro Bendahara
Branch 0000 - KANTOR PUSAT OPERASI
Currency IDR
Print Date 13 Jan 2025 11:51:01 Oleh ANTI AGUSTIN

No	Posting Date	Effective Date	Narasi	Debit Transaction	Credit Transaction	Balance
1	02 Dec 2024	02 Dec 2024	J714/SP2D/2810 20241202/5644/SP2D-LS/DKBP3A/2024 ENTANG ABDUL AZIZ, S.E.		67,196,459.00	67,196,459.00
2	02 Dec 2024	02 Dec 2024	L246/900/930-DKBP3A/2024 PEMBAYARAN GAJI DKBP3A BULAN DESEMB ER 2024	67,196,459.00		.00
3	06 Dec 2024	06 Dec 2024	L246/SP2D/2810 20241206/5718/SP2D-GU/DKBP3A/2024 ENTANG ABDUL AZIZ, S.E.		5,215,000.00	5,215,000.00
4	11 Dec 2024	11 Dec 2024	TRF KE DKBP3A SEKRETAR NOREK 0088631633001 00021/TBP/2.08.2.14.0.00.01./B03/20	4,135,439.00		1,079,561.00
5	13 Dec 2024	13 Dec 2024	TRF KE DKBP3A SEKRETAR NOREK 0088631633001 00022/TBP/2.08.2.14.0.00.01./B03/20	1,004,800.00		74,761.00
6	17 Dec 2024	17 Dec 2024	TRF DARI DKBP3A BID PPPA NOREK 0083615168001 00023/TBP/2.08.2.14.0.00.01./B15/20		16,623,300.00	16,698,061.00
7	18 Dec 2024	18 Dec 2024	45529 00033/BPK/2.08.2.14.0.00.01./ B03/2024	4,560,000.00		12,138,061.00
8	18 Dec 2024	18 Dec 2024	45530 00032/BPK/2.08.2.14.0.00.01./ B03/2024	1,063,300.00		11,074,761.00
9	18 Dec 2024	18 Dec 2024	45531 00031/BPK/2.08.2.14.0.00.01./ B03/2024	2,200,000.00		8,874,761.00
10	18 Dec 2024	18 Dec 2024	45532 00030/BPK/2.08.2.14.0.00.01./ B03/2024	2,200,000.00		6,674,761.00
11	18 Dec 2024	18 Dec 2024	45533 00029/BPK/2.08.2.14.0.00.01./ B03/2024	2,200,000.00		4,474,761.00
12	18 Dec 2024	18 Dec 2024	45534 00028/BPK/2.08.2.14.0.00.01./ B03/2024	2,200,000.00		2,274,761.00

No	Posting Date	Effective Date	Narasi	Debit Transaction	Credit Transaction	Balance
13	18 Dec 2024	18 Dec 2024	TRF KE FUJI KUMALA NOREK 0102642236100 00027/BPK/2.08.2.14.0.00.01./B03/20	2,200,000.00		74,761.00
14	19 Dec 2024	19 Dec 2024	K662/TOLAKAN KLIRING IBC0000241218KO2115_20241218_NAMA BEDA		4,560,000.00	4,634,761.00
15	19 Dec 2024	19 Dec 2024	K662/TOLAKAN KLIRING IBC0000241218KO2116_20241218_NAMA BEDA		1,063,300.00	5,698,061.00
16	19 Dec 2024	19 Dec 2024	K662/TOLAKAN KLIRING IBC0000241218KO2118_20241218_NAMA BEDA		2,200,000.00	7,898,061.00
17	19 Dec 2024	19 Dec 2024	K662/TOLAKAN KLIRING IBC0000241218KO2119_20241218_NAMA BEDA		2,200,000.00	10,098,061.00
18	19 Dec 2024	19 Dec 2024	K662/TOLAKAN KLIRING IBC0000241218KO2120_202412		2,200,000.00	12,298,061.00
19	20 Dec 2024	20 Dec 2024	TRF KE TINI SURTINI NOREK 0096355521100 00033/BPK/2.08.2.14.0.00.01./B03/20	4,560,000.00		7,738,061.00
20	20 Dec 2024	20 Dec 2024	TRF KE TINI SURTINI NOREK 0096355521100 00032/BPK/2.08.2.14.0.00.01./B03/20	1,063,300.00		6,674,761.00
21	20 Dec 2024	20 Dec 2024	TRF KE LINA MARLINA NOREK 0082116778778 00030/BPK/2.08.2.14.0.00.01./B03/20	2,200,000.00		4,474,761.00
22	20 Dec 2024	20 Dec 2024	TRF KE TINI SURTINI NOREK 0096355521100 00029/BPK/2.08.2.14.0.00.01./B03/20	2,200,000.00		2,274,761.00
23	20 Dec 2024	20 Dec 2024	TRF KE VINA VITRIANA NOREK 0069099106100 00028/BPK/2.08.2.14.0.00.01./B03/20	2,200,000.00		74,761.00
24	27 Dec 2024	27 Dec 2024	TRF DARI DKBP3A SEKRETAR NOREK 0088631633001 00025/TBP/2.08.2.14.0.00.01. /B04/20		16,570.00	91,331.00
25	30 Dec 2024	30 Dec 2024	TRF KE RKUD KAB PANGAN NOREK 0029908737001 001/SISA-UP/DKBP3A/2024	91,331.00		.00



Account Activity

Period 01 Dec 2024 - 31 Dec 2024 Alamat JLN STASIUN DESA
Corporate DINAS DKBP3A KABUPATEN PANGANDARAN DS PARIGI KEC PARIGI
Account 0083615168001 - DKBP3A BIDANG PPPA KABUPATEN PANGANDARAN
Product Giro Bendahara
Branch 0000 - KANTOR PUSAT OPERASI
Currency IDR
Print Date 06 Jan 2025 08:51:00 Oleh ANTI AGUSTIN

No	Posting Date	Effective Date	Narasi	Debit Transaction	Credit Transaction	Balance
1	17 Dec 2024	17 Dec 2024	TRF KE DINAS DKBP3A NOREK 0075324200001 00023/TBP/2.08.2.14.0.00.01./B15/20	16,623,300.00		.00



Account Activity

Period 01 Dec 2024 - 31 Dec 2024 Alamat JLN STASIUN DESA
Corporate DINAS DKBP3A KABUPATEN PANGANDARAN DS PARIGI KEC PARIGI
Account 0088631633001 - DKBP3A SEKRETARIAT KABUPATEN PANGANDARAN
Product Giro Bendahara
Branch 0000 - KANTOR PUSAT OPERASI
Currency IDR
Print Date 06 Jan 2025 08:51:00 Oleh ANTI AGUSTIN

No	Posting Date	Effective Date	Narasi	Debit Transaction	Credit Transaction	Balance
1	11 Dec 2024	11 Dec 2024	TRF DARI DINAS DKBP3A NOREK 0075324200001 00021/TBP/2.08.2.14.0.00.01./B03/20		4,135,439.00	4,150,009.00
2	11 Dec 2024	11 Dec 2024	TRF KE WINDA SONDARI NOREK 0100679159100 00168/BPK/2.08.2.14.0.00.01./B04/20	1,163,730.00		2,986,279.00
3	11 Dec 2024	11 Dec 2024	TRF KE WINDA SONDARI NOREK 0100679159100 00167/BPK/2.08.2.14.0.00.01./B04/20	1,703,879.00		1,282,400.00
4	13 Dec 2024	13 Dec 2024	TRF DARI DINAS DKBP3A NOREK 0075324200001 00022/TBP/2.08.2.14.0.00.01./B03/20		1,004,800.00	2,287,200.00
5	16 Dec 2024	16 Dec 2024	TRF KE WINDA SONDARI NOREK 0100679159100 00170/BPK/2.08.2.14.0.00.01./B04/20	1,004,800.00		1,282,400.00
6	16 Dec 2024	16 Dec 2024	TRF KE WINDA SONDARI NOREK 0100679159100 00169/BPK/2.08.2.14.0.00.01./B04/20	94,000.00		1,188,400.00
7	18 Dec 2024	18 Dec 2024	TRF KE WINDA SONDARI NOREK 0100679159100 00171/BPK/2.08.2.14.0.00.01./B04/20	1,171,830.00		16,570.00
8	27 Dec 2024	27 Dec 2024	TRF KE DINAS DKBP3A NOREK 0075324200001 00025/TBP/2.08.2.14.0.00.01./B04/20	16,570.00		.00



Account Activity

Period	01 Dec 2024 - 31 Dec 2024	Alamat	JLN STASIUN DESA
Corporate	DINAS DKBP3A KABUPATEN PANGANDARAN		DS PARIGI KEC PARIGI
Account	0083615125001 - DKBP3A BIDANG DALDUK		KABUPATEN PANGANDARAN
Product	Giro Bendahara		
Branch	0000 - KANTOR PUSAT OPERASI		
Currency	IDR		
Print Date	10 Jan 2025 22:20:28	Oleh	ANTI AGUSTIN



Account Activity

Period	01 Dec 2024 - 31 Dec 2024	Alamat	JLN STASIUN DESA
Corporate	DINAS DKBP3A KABUPATEN PANGANDARAN		DS PARIGI KEC PARIGI
Account	0083615052001 - DKBP3A BIDANG KB		KABUPATEN PANGANDARAN
Product	Giro Bendahara		
Branch	0000 - KANTOR PUSAT OPERASI		
Currency	IDR		
Print Date	06 Jan 2025 08:57:01	Oleh	ANTI AGUSTIN



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jln. Raya Pangl No. 24 Tlp/Fax (0265) 7500624 Desa Karangbenda Kec. Pangl Kab. Pangandaran Jawa Barat 46393

BERITA ACARA INVENTARISASI/STOCK OPNAME PERSEDIAAN

Nomor : 028/ 1008-DKBP3A /2024

Nama : Adang Lutfi Setiawan, S.E
NIP : 19960320 202203 1 008
Jabatan : Pengurus Barang DKBP3A

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya telah melaksanakan Inventarisasi/Stock Opname Persediaan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Pada Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang ada pada Kantor DKBP3A dan mempertanggungjawabkan Persediaan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran tersebut dengan rincian sebagai berikut :

1. Rekap Barang ke Neraca

No	KODE REKENING	JENIS PERSEDIAAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
				TAMBAH	KURANG	
1	5.1.02.01.01	BELANJA BAHAN BAHAN	-	33.750.000,00	33.750.000,00	-
2	5.1.02.01.01	BELANJA SUKU CADANG	-	10.139.200,00	10.139.200,00	-
3	5.1.02.01.01	BELANJA ALAT KANTOR	18.062.318,33	305.999.755,00	300.142.570,00	23.919.503,33
4	5.1.02.01.01	BELANJA OBAT	-	-	-	-
5	5.1.02.01.01	BELANJA DISERAHKAN	157.822.598,54	790.604.655,00	858.867.208,54	89.560.045,00
6	5.1.02.01.01	BELANJA STRATEGIS	-	-	-	-
7	5.1.02.01.01	BELANJA NATURA DAN PAKAN	-	-	-	-
8	5.1.02.01.01	BELANJA PERSEDIAAN PENELITIAN	-	-	-	-
9	5.1.02.01.01	BELANJA PERSEDIAAN DALAM PROSES	-	-	-	-
10	5.1.02.01.01	BELANJA MAMIN	-	1.142.530.000,00	1.142.530.000,00	-
11	5.1.02.01.01	BELANJA PAKAIAN	-	-	-	-
12	5.1.02.01.01	BELANJA BAHAN MEDIS HABIS PAKAI	-	-	-	-
13	5.1.02.01.02	BELANJA BARANG TAK HABIS PAKAI	-	-	-	-
JUMLAH			175.884.916,87	2.283.023.610,00	2.345.428.978,54	113.479.548,33

2. Barang - Barang Rusak Berat/Kadaluarsa

No	KODE REKENING	JENIS PERSEDIAAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
				TAMBAH	KURANG	
1	5.1.02.01.01	BELANJA ALAT KANTOR	-	-	-	-
2	5.1.02.01.01	BELANJA OBAT	-	-	-	-
3	5.1.02.01.01	BELANJA DISERAHKAN	-	-	-	-
4	5.1.02.01.02	BELANJA BARANG TAK HABIS PAKAI	-	-	-	-
JUMLAH			-	-	-	-

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Kasubag Program dan Keuangan

Surayaman, SKM

NIP. 19800310 200902 1 005

Pangl, 31 Desember 2024
Pengurus Barang

Adang Lutfi Setiawan, S.E
NIP. 19960320 202203 1 008



H. Dani Hamdani, S.Sos., MM
NIP. 19650417 199003 1 013

Pesertaan
20 Januari 2025
Inventarisasi dan Penatausahaan
Andi Dedy
115 RISTANI, I.H., M.H
19930813 201503 2 001

Projeto	Atividade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Observações
1.0 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA	1.1 - OBRAS DE FUNDAMENTAÇÃO	1.1.1 - FUNDAÇÃO EM CONCRETO	1.1.1.1 - FUNDAÇÃO EM CONCRETO	1.1.1.1.1 - FUNDAÇÃO EM CONCRETO	
	1.2 - OBRAS DE ALINHAMENTO	1.2.1 - ALINHAMENTO EM TERRAPLENAGEM	1.2.1.1 - ALINHAMENTO EM TERRAPLENAGEM	1.2.1.1.1 - ALINHAMENTO EM TERRAPLENAGEM	
	1.3 - OBRAS DE DRENAGEM	1.3.1 - DRENAGEM EM TERRAPLENAGEM	1.3.1.1 - DRENAGEM EM TERRAPLENAGEM	1.3.1.1.1 - DRENAGEM EM TERRAPLENAGEM	
	1.4 - OBRAS DE REVESTIMENTO	1.4.1 - REVESTIMENTO EM CIMENTO	1.4.1.1 - REVESTIMENTO EM CIMENTO	1.4.1.1.1 - REVESTIMENTO EM CIMENTO	
2.0 - OBRAS DE EDIFICAÇÃO	2.1 - OBRAS DE FUNDAMENTAÇÃO	2.1.1 - FUNDAÇÃO EM CONCRETO	2.1.1.1 - FUNDAÇÃO EM CONCRETO	2.1.1.1.1 - FUNDAÇÃO EM CONCRETO	
	2.2 - OBRAS DE ALINHAMENTO	2.2.1 - ALINHAMENTO EM TERRAPLENAGEM	2.2.1.1 - ALINHAMENTO EM TERRAPLENAGEM	2.2.1.1.1 - ALINHAMENTO EM TERRAPLENAGEM	
	2.3 - OBRAS DE DRENAGEM	2.3.1 - DRENAGEM EM TERRAPLENAGEM	2.3.1.1 - DRENAGEM EM TERRAPLENAGEM	2.3.1.1.1 - DRENAGEM EM TERRAPLENAGEM	
	2.4 - OBRAS DE REVESTIMENTO	2.4.1 - REVESTIMENTO EM CIMENTO	2.4.1.1 - REVESTIMENTO EM CIMENTO	2.4.1.1.1 - REVESTIMENTO EM CIMENTO	
3.0 - OBRAS DE EQUIPAMENTOS	3.1 - OBRAS DE FUNDAMENTAÇÃO	3.1.1 - FUNDAÇÃO EM CONCRETO	3.1.1.1 - FUNDAÇÃO EM CONCRETO	3.1.1.1.1 - FUNDAÇÃO EM CONCRETO	
	3.2 - OBRAS DE ALINHAMENTO	3.2.1 - ALINHAMENTO EM TERRAPLENAGEM	3.2.1.1 - ALINHAMENTO EM TERRAPLENAGEM	3.2.1.1.1 - ALINHAMENTO EM TERRAPLENAGEM	
	3.3 - OBRAS DE DRENAGEM	3.3.1 - DRENAGEM EM TERRAPLENAGEM	3.3.1.1 - DRENAGEM EM TERRAPLENAGEM	3.3.1.1.1 - DRENAGEM EM TERRAPLENAGEM	
	3.4 - OBRAS DE REVESTIMENTO	3.4.1 - REVESTIMENTO EM CIMENTO	3.4.1.1 - REVESTIMENTO EM CIMENTO	3.4.1.1.1 - REVESTIMENTO EM CIMENTO	
4.0 - OBRAS DE MANUTENÇÃO	4.1 - OBRAS DE FUNDAMENTAÇÃO	4.1.1 - FUNDAÇÃO EM CONCRETO	4.1.1.1 - FUNDAÇÃO EM CONCRETO	4.1.1.1.1 - FUNDAÇÃO EM CONCRETO	
	4.2 - OBRAS DE ALINHAMENTO	4.2.1 - ALINHAMENTO EM TERRAPLENAGEM	4.2.1.1 - ALINHAMENTO EM TERRAPLENAGEM	4.2.1.1.1 - ALINHAMENTO EM TERRAPLENAGEM	
	4.3 - OBRAS DE DRENAGEM	4.3.1 - DRENAGEM EM TERRAPLENAGEM	4.3.1.1 - DRENAGEM EM TERRAPLENAGEM	4.3.1.1.1 - DRENAGEM EM TERRAPLENAGEM	
	4.4 - OBRAS DE REVESTIMENTO	4.4.1 - REVESTIMENTO EM CIMENTO	4.4.1.1 - REVESTIMENTO EM CIMENTO	4.4.1.1.1 - REVESTIMENTO EM CIMENTO	



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl. Raya Parigi No. 24 Tlp/Fax (0265) 7500624 Desa Karangbenda Parigi 46393

BERITA ACARA REKONSILIASI BARANG MILIK DAERAH

Nomor : 028 /~~1009~~ -DKBP3A /2024

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Adang Lutfi Setiawan, S.E
NIP. : 19960320 202203 1 008
Jabatan : Pengurus Barang

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya telah melaksanakan Rekonsiliasi Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran pada Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang ada pada Kantor DKBP3A Kabupaten Pangandaran dan mempertanggungjawabkan Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran tersebut dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekap Barang ke Neraca

Kecap Barang ke Neraca					
NO	JENIS ASET	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
ASET TETAP					
1	Tanah	-	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	5.873.211.911,37	-	52.008.000,00	5.821.203.911,37
3	Gedung dan Bangunan	1.841.892.285,00	19.702.500,00	19.702.500,00	1.841.892.285,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	1.830.000,00	-	-	1.830.000,00
6	Konstruksi Dalam Pekerjaan	-	-	-	-
JUMLAH		7.716.934.196,37	19.702.500,00	71.710.500,00	7.664.926.196,37
ASET LAINNYA					
		SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	Aset Lainnya RB	529.157.888,63	-	45.000.000,00	484.157.888,63
2	Dimanfaatkan Pihak Ketiga	-	-	-	-
3	Aset Tak Berwujud	-	-	-	-
JUMLAH		529.157.888,63	-	45.000.000,00	484.157.888,63
JUMLAH TOTAL		8.246.092.085,00	19.702.500,00	116.710.500,00	8.149.084.085,00

2. Rekap Barang Ekstrakompatible

NO	JENIS ASET	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	Ekstrakompatible	109.272.191,00	-	-	109.272.191,00
JUMLAH		109.272.191,00	-	-	109.272.191,00

Demikian Berita Acara Ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN

SURYAMAN, SKM
NIP. 19800310 200902 1 005

Parigi, 31 Desember 2024

PENGURUS BARANG

ADANG LUTFI SETIAWAN, S.E
NIP. 19960320 202203 1 008



Mengetahui :
KEPALA DKBP3A
Aset
24 Januari 2025
Inventarisasi dan Penatausahaan
Asst
H. DARI HAMDANI, S.H., M.Si
19930713 201503 2 001

REKAPITULASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET
SEMESTER II TAHUN 2024

NO	URAIAN	Tanah	Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Jalan, Irigasi & Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi dalam Pengerjaan	Jumlah
		KIB-A	KIB-B	KIB-C	KIB-D	KIB-E	KIB-F	
1								
2								
3	SALDO AWAL		5.873.211.911,37	1.841.892.285,00		1.830.000,00		7.716.934.196,37
4	Penambahan Aset Tetap							19.702.500,00
5	- Belanja Modal Tahun 2024 (LRA)			19.702.500,00				
6	- Aset yang berasal dari Dana BOS (LRA)							
7	- Aset yang berasal dari Dana BLUD (LRA)							
8	- Aset yang berasal dari Donasi/Hibah dari Provinsi							
9	- Aset yang berasal dari Donasi/Hibah dari Kabupaten Lain							
10	- Aset yang berasal dari Donasi/Hibah dari Pusat/Kementerian							
11	- Aset yang berasal dari Donasi/Hibah Pihak Ketiga							
12	- Aset Tetap mutasi dari UFB Lain Internal Dinas							
13	- Aset Tetap mutasi dari SKPD Lain							
14	- Kapitalisasi Dari Belanja Barang & Jasa ke Aset Tetap							
15	- Kapitalisasi dan belanja jasa konsultan perencanaan							
16	- Kapitalisasi dan belanja jasa konsultan pengawasan							
17	- Kapitalisasi dari Biaya Umum / Honorarium							
18	- Reklasifikasi Dari Belanja Barang & Jasa menjadi Aset Tetap							
19	- Reklasifikasi dari Aset Lainnya Rusak Berat, Lupuk, Hangus dll							
20	- Reklasifikasi dari Aset Lainnya Dimanfaatkan Oleh Pihak Ketiga							
21	- Reklasifikasi dari Aset Lainnya Aset Tak Berwujud							
22	- Reklasifikasi Dari Barang Ekstrakontributabel							
23	- Reklasifikasi Dari Persediaan Menjadi Aset Tetap							
24	- Reklas antar KIB							
25	- Koreksi: Penilaian/Kesalahan							
26	- Penambahan Aset Tetap Pengaruh Aplikasi BMD							
27	- Aset Tetap yang belum dikalif berdasarkan hasil inventarisasi/persediaan							
28	- Huang Tahun Belanja							
29	- Penambahan Lainnya							
30	SUB JUMLAH PENAMBAHAN (5 s.d 27)			19.702.500,00				19.702.500,00
31	Pengurangan Aset Tetap							
32	- Reklasifikasi Belanja Modal menjadi Barang Persediaan/Habis Pakai							
33	- Reklasifikasi Belanja Modal menjadi Barang Persediaan Yang Akan Dipersebar/Dibagikan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga							
34	- Penghapusan Aset Tetap (SK Penghapusan)							
35	- Mutasi Ke UFB Lain / Internal Dinas							
36	- Mutasi Ke SKPD Lain / Dinas							
37	- Aset yang dihibahkan Ke Provinsi Atau Kabupaten Lain							
38	- Aset yang dihibahkan Ke Kabupaten Lain							
39	- Aset yang dihibahkan Ke Pusat/Kementerian							
40	- Aset yang dihibahkan Ke Pihak Ketiga							
41	- Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya (Rusak Berat, Lupuk, Hangus, Hilang dll)							
42	- Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya (Dimanfaatkan Oleh Pihak Ketiga)							
43	- Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya Aset Tak Berwujud							
44	- Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Barang Ekstrakontributabel							
45	- Reklas antar KIB							
46	- Koreksi: Penilaian/Kesalahan							
47	- Pengurangan Aset Tetap Pengaruh Aplikasi BMD							

48	- Pengapusan Aset Tetap (Manual Salak Entry)	-	-	-	-	-	-
49	- Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya	-	-	-	-	19.702.500,00	19.702.500,00
50	- Pengurangan Lainnya	-	-	-	-	-	-
51	SUB JUMLAH PENGURANGAN (30 s/d 46)	-	-	-	-	52.008.000,00	52.008.000,00
52		-	-	-	-	19.702.500,00	-
53	SALDO AKHIR ASET TETAP (3 + 28 - 47)	-	-	-	-	1.841.892.285,00	1.830.000,00
54	SALDO AKHIR SIMBA BMD	-	-	-	-	-	7.664.926.196,37
55	SELISIH (49 - 50)	-	-	-	-	-	7.664.926.196,37
56		-	-	-	-	-	-

REKAPITULASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET
SEMESTER II TAHUN 2024

	ASET LAINNYA					Tanah	Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Jalan, Irigasi & Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Aset Tidak Berwujud	Jumlah
57	SALDO AWAL					-	-	-	-	-	-	-
58	a. ASET LAINNYA RB					-	438.882.888,63	90.275.000,00	-	-	-	529.157.888,63
59	b. DIMANFAATKAN PIHAK KETIGA					-	-	-	-	-	-	-
60	c. ASET TAK BERWUJUD					-	-	-	-	-	-	-
61	JUMLAH SALDO AWAL ASET LAINNYA (55 s.d 57)					-	438.882.888,63	90.275.000,00	-	-	-	529.157.888,63
62	a. Penambahan Aset Lainnya RB					-	-	-	-	-	-	-
63	- Rakas dan Aset Tetap					-	-	-	-	-	-	-
64	- Rakas Dan Ekstrakompatible					-	-	-	-	-	-	-
65	- Mulas Dan SKPD Lain					-	-	-	-	-	-	-
66	- Belum Tercatat					-	-	-	-	-	-	-
67	- Penambahan Lainnya					-	-	-	-	-	-	-
68	SUB JUMLAH (60 s.d 64)					-	-	-	-	-	-	-
69	b. Penambahan Aset Lainnya Dimanfaatkan Pihak Ketiga					-	-	-	-	-	-	-
70	- Rakas dan Aset Tetap					-	-	-	-	-	-	-
71	- Rakas Dan Ekstrakompatible					-	-	-	-	-	-	-
72	- Mulas Dan SKPD Lain					-	-	-	-	-	-	-
73	- Belum Tercatat					-	-	-	-	-	-	-
74	- Penambahan Lainnya					-	-	-	-	-	-	-
75	SUB JUMLAH (67 s.d 71)					-	-	-	-	-	-	-
76	c. Penambahan Aset Tak Berwujud					-	-	-	-	-	-	-
77	- Biaya dari Barang dan Jasa					-	-	-	-	-	-	-
78	- Rakas dan Aset Tetap					-	-	-	-	-	-	-
79	- Mulas Dan SKPD Lain atau Hibah					-	-	-	-	-	-	-
80	- Belum Tercatat					-	-	-	-	-	-	-
81	- Penambahan Lainnya					-	-	-	-	-	-	-
82	SUB JUMLAH (74 s.d 78)					-	-	-	-	-	-	-
83	a. Pengurangan Aset Lainnya RB					-	45.000.000,00	-	-	-	-	45.000.000,00
84	- Penghapusan					-	-	-	-	-	-	-
85	- Rakas ke Aset Tetap					-	-	-	-	-	-	-
86	- Rakas Ke Ekstrakompatible					-	-	-	-	-	-	-
87	- Mulas Ke SKPD Lain					-	-	-	-	-	-	-
88	- Pengurangan Lainnya					-	-	-	-	-	-	-
89	SUB JUMLAH (81 s.d 85)					-	45.000.000,00	-	-	-	-	45.000.000,00
90	b. Pengurangan Aset Lainnya Dimanfaatkan Oleh Pihak Ketiga					-	-	-	-	-	-	-
91	- Penghapusan					-	-	-	-	-	-	-
92	- Rakas ke Aset Tetap					-	-	-	-	-	-	-
93	- Rakas Ke Ekstrakompatible					-	-	-	-	-	-	-
94	- Mulas Ke SKPD Lain					-	-	-	-	-	-	-
95	- Pengurangan Lainnya					-	-	-	-	-	-	-
96	SUB JUMLAH (88 s.d 92)					-	-	-	-	-	-	-
97	c. Pengurangan Aset Tak Berwujud					-	-	-	-	-	-	-
98	- Penghapusan					-	-	-	-	-	-	-
99	- Rakas ke Aset Tetap					-	-	-	-	-	-	-
100	- Rakas Ke Ekstrakompatible					-	-	-	-	-	-	-
101	- Mulas Ke SKPD Lain					-	-	-	-	-	-	-
102	- Pengurangan Lainnya					-	-	-	-	-	-	-
103	SUB JUMLAH (95 s.d 99)					-	-	-	-	-	-	-
104	a. ASET LAINNYA RB (55 + 65 - 86)					-	393.882.888,63	90.275.000,00	-	-	-	484.157.888,63
105	b. DIMANFAATKAN PIHAK KETIGA (56 + 72 - 93)					-	-	-	-	-	-	-
106						-	-	-	-	-	-	-
107						-	-	-	-	-	-	-

RIKAP

108	c. ASET TAK BERUJUD (57 - 79 - 100)	-	-	-	-
109	SALDO AKHIR ASET LAINNYA (101 s/d 103)	-	393.882.888,63	90.275.000,00	484.157.888,63
110	SALDO AKHIR SIMBA BMD	-	-	-	-
111	SELISIH (104 - 105)	-	393.882.888,63	90.275.000,00	484.157.888,63
112					

REKAPITULASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET
SEMESTER II TAHUN 2024

	EKSTRAKOMPATABLE						Jumlah
	SALDO AWAL	Tanah	Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Jalan, Irigasi & Jaringan	Aset Tetap Lainnya	
113							
114	Penambahan Ekstrakompable						
115	- Reklasifikasi dari Aset Tetap menjadi Barang Ekstrakompable						
116	- Reklasifikasi dari Aset Lainnya Rusak Berat, Lapuk, dll menjadi Barang Ekstrakompable						
117	- Reklasifikasi dari Aset Lainnya Dimanfaatkan Oleh Pihak ketiga menjadi Barang Ekstrakompable						
118	- Reklasifikasi dari Aset Lainnya Aset Tak Berwujud menjadi Barang Ekstrakompable						
119	- Mutasi dari UPB lain / Internal Dinas						
120	- Mutasi dari SKPD lain						
121	- Penambahan Lainnya						
122							
123	SUB JUMLAH (112 s.d 118)						
124	Pengurangan Ekstrakompable						
125	- Reklasifikasi Ekstrakompable ke Aset Tetap						
126	- Reklasifikasi Ekstrakompable ke Aset Lainnya Rusak Berat, Lapuk, dll						
127	- Reklasifikasi Ekstrakompable ke Aset Lainnya Dimanfaatkan Oleh Pihak ketiga						
128	- Reklasifikasi Ekstrakompable ke Aset Lainnya Aset Tak Berwujud						
129	- Mutasi ke UPB Lain / Internal Dinas						
130	- Mutasi ke SKPD Lain						
131	- Rukhsa ke Persediaan						
132	- Penghapusan						
133	- Pengurangan Lainnya						
134							
135	SUB JUMLAH (121 s.d 129)						
	SALDO AKHIR EKSTRAKOMPATABLE (110 + 119 - 130)		74.272.191,00	35.000.000,00			109.272.191,00

PENGURUS BARANG DKBP3A
KABUPATEN PANGANDARAN

AANG LUTFI HADARI, S.E
NIP. 19960320 202203 1 008

